

POLITIK REKOGNISI DI INDONESIA:
Representasi Perempuan Tionghoa Nonmuslim Menjadi
Kepala Daerah Kota Singkawang



Oleh:
Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis
NIM: 19300016084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Studi Islam

YOGYAKARTA
2023



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis
NIM : 19300016084
Jenjang : Doktor
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 8 April 2023

Saya yang menyatakan



Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis

NIM: 19300016084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Judul Disertasi : POLITIK REKOGNISI DI INDONESIA: REPRESENTASI
PEREMPUAN TIONGHOA NONMUSLIM MENJADI
KEPALA DAERAH KOTA SINGKAWANG
Ditulis oleh : Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis
NIM : 19300016084
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

**Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 31 Mei 2023

An. Rektor/
Ketua Sidang,



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag.
NIP.: 19721204 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 24 MARET 2023), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **ALI AKHBAR ABAIB MAS RABBANI LUBIS** NOMOR INDUK: **19300016084** LAHIR DI **SAMBAS**, TANGGAL **23 SEPTEMBER 1992**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-910.**

YOGYAKARTA, 31 MEI 2023

An. REKTOR /
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag.

NIP.: 19721204 199703 1 003

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

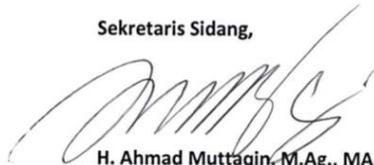
Nama Promovendus : Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis ()
NIM : 19300016084
Judul Disertasi : POLITIK REKOGNISI DI INDONESIA: REPRESENTASI PEREMPUAN
TIONGHOA NONMUSLIM MENJADI KEPALA DAERAH KOTA
SINGKAWANG

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag. ()
Sekretaris Sidang : H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., MA., Ph.D. ()
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. ()
(Promotor/Penguji)
2. Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si. ()
(Promotor/Penguji)
3. Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag., M.Pd., M.A. ()
(Penguji)
4. Prof. Dr. Zaenuddin, M.A., M.A. ()
(Penguji)
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. ()
(Penguji)
6. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. ()
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 14.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3,75
Predikat Kelulusan : Pujian (*Cumlaude*) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,



H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., MA., Ph.D.
NIP.: 19720414 199903 1 002

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor :

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

()

Promotor :

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

()

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**POLITIK REKOGNISI DI INDONESIA:
Representasi Perempuan Tionghoa Non-Muslim menjadi
Kepala Daerah Kota Singkawang**

Yang ditulis oleh :
Nama : Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H
NIM : 19300016084
Program : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 24 Maret 2023, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2023
Promotor,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

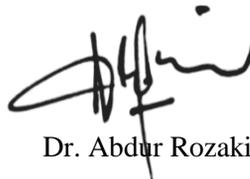
**POLITIK REKOGNISI DI INDONESIA:
Representasi Perempuan Tionghoa Non-Muslim menjadi
Kepala Daerah Kota Singkawang**

Yang ditulis oleh :
Nama : Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H
NIM : 19300016084
Program : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 24 Maret 2023, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2023
Promotor,



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**POLITIK REKOGNISI DI INDONESIA:
Representasi Perempuan Tionghoa Non-Muslim menjadi
Kepala Daerah Kota Singkawang**

Yang ditulis oleh :
Nama : Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H
NIM : 19300016084
Program : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 24 Maret 2023, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2023
Penguji,



Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag., M.Pd., M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertai berjudul:

**POLITIK REKOGNISI DI INDONESIA:
Representasi Perempuan Tionghoa Non-Muslim menjadi
Kepala Daerah Kota Singkawang**

Yang ditulis oleh :
Nama : Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H
NIM : 19300016084
Program : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 24 Maret 2023, Saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 April 2023
Penguji,



Prof. Dr. H. Zaenuddin, M.A., M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

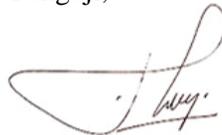
**POLITIK REKOGNISI DI INDONESIA:
Representasi Perempuan Tionghoa Non-Muslim menjadi
Kepala Daerah Kota Singkawang**

Yang ditulis oleh :
Nama : Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H
NIM : 19300016084
Program : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 24 Maret 2023, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2023
Penguji,



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Politik rekognisi muncul karena ada persoalan salah pengakuan atau tidak ada pengakuan yang berkaitan dengan adanya dominasi budaya, simbol agama, dan ketidakadilan lainnya (sosial, ekonomi, politik, dan hukum) sehingga diperlukan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan. Penelitian ini mengungkap realitas sosial masyarakat dan legal-formal atas keterlibatan perempuan dan etnik Tionghoa dalam ruang politik di Indonesia dan juga keterpilihan perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang tahun 2017–2022. Selanjutnya, penelitian ini mengulas relasi budaya dan proses politik dalam tahapan kandidasi serta membahas mengenai resiprokal rekognisi setelah menjadi kepala daerah dalam penguatan keberagaman.

Penelitian kualitatif ini menggunakan bingkai teoretis dan kerja lapangan. Penelitian dengan pendekatan studi kasus intrinsik dan sosiolegal ini dilakukan dengan teknik pengumpulan datanya melalui dokumentasi, catatan arsip, wawancara, observasi langsung, dan artefak fisik. Analisis datanya dilakukan melalui tahapan kondensasi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca-Reformasi telah membuka ruang politik secara terbuka bagi perjuangan politik rekognisi atas perempuan dan etnik Tionghoa di Indonesia. Perjuangannya secara konstitusional telah dilakukan sejak masa kemerdekaan hingga pasca-Reformasi, bahkan terlibat secara langsung. Keterpilihan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang tahun 2017 di tengah mayoritas muslim muncul karena masyarakat Singkawang yang sudah terbuka dengan perbedaan sehingga potensi dari keterpilihan tersebut didasarkan atas faktor 1) karisma individu; 2) akomodasi perundang-undangan di Indonesia yang mempertegas narasi gender atau paritas partisipatori, khususnya mengenai pilkada; 3) persilangan kekuatan etnis, agama, dan gender (*cross-cutting power*); 4) dukungan dari

gabungan partai politik; 5) mobilisasi uang dan jaringan. Dari kepemimpinannya tersebut, Kota Singkawang menjadi Kota Tertoleran di Indonesia dan kemunculan perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi Kepala Daerah di Kota Singkawang tahun 2017–2022 adalah fakta dari *living* rekognisi.

Kata Kunci: Politik Rekognisi, Kota Singkawang, Kepala Daerah, Perempuan Tionghoa Nonmuslim



ABSTRACT

Politic of recognition appeared due to inappropriate recognition or the absence of it with regard to culture domination, religious symbols and other unfairness (socially, economically, politically and lawfully) from which struggle was needed. This study reveals the society's reality and its legal-formal of the involvement of women and the Chinese in Indonesian politics and the electability of non-muslim female Chinese a mayor of Singkawang City of 2017-2022. The research also discusses culture relation and political process during candidate appointment, and talks about reciprocal recognition following her election for a diversity strength purpose.

This qualitative study employed both theoretical and field frameworks. Applying intrinsic case study and socio-legal approaches, the data were collected through documentation, filing, interview, direct observation and physical artefact. It was analysed under data condensation, data display and conclusion drawing/verification steps. The research took place in Singkawang City, West Kalimantan.

The results shows that post-reform has widely opened political space for recognition of Indonesian women and Chinese. Their institutional struggle has begun since the independence of the nation till it reached the goal during the post-reform era in which they actively involved. The welcoming attitude of the Muslim majority made a female Chinese non-muslim a mayor of Singkawang a reality; and the electability is because of the following factors: 1) individual charisma; 2) the Indonesian institution accomodating gender naration or parity participatory on local head in particular; 3) ethnic, religion and gender cross-cutting power; 4) poilitical party-collaboration support; 5) money and network mobilisation. The non-muslim Chinese female winning a myor makes Singkawang the Indonesian most tolerant city, and, at the same time, reveals that living recognition is a fact.

Key Words: Politic of Recognition, Singkawang City, Mayor, Non-Muslim Chinese Female

الملخص

تظهر سياسة الاعتراف بسبب مشكلة الاعتراف الخاطئ أو عدم وجود الاعتراف فيما يتعلق بالهيمنة الثقافية والرموز الدينية وغيرها من المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، لذلك هناك حاجة إلى السعي للحصول على الاعتراف. وكشفت هذه الدراسة عن الحقائق الاجتماعية والقانونية الرسمية حول مشاركة المرأة والقومية الصينية في الفضاء السياسي في إندونيسيا، وكذلك انتخاب المرأة الصينية غير المسلمة لشغل منصب رئيسة إقليم لمدينة سينجكاوانج Singkawang في 2017-2022. كما تناولت هذه الدراسة العلاقات الثقافية والعمليات السياسية التي تجري في مراحل الترشح، وناقشت الاعتراف المتبادل في تعزيز التنوع بعد أن عينت رئيسة إقليمية.

تعد هذه الدراسة بحثاً نوعياً فاعتمد الباحث فيها على الإطار النظري والعمل الميداني، واستخدم فيها منهج دراسة الحالة الجوهرية والاجتماعية والقانونية. أما التقنيات التي تم اختيارها في جمع البيانات فتتكون من التوثيق والسجلات الأرشيفية والمقابلات والملاحظة المباشرة والتحف المادية. ثم حلت هذه البيانات من خلال مراحل تكثيف البيانات وعرضها واستخلاص النتائج. وكان موقع البحث في مدينة سينكاوانج Singkawang، كاليمانتان الغربية.

توصلت هذه الدراسة إلى أن فترة ما بعد الإصلاح السياسي قد فتحت مساحة سياسية للنضال السياسي من أجل الاعتراف بالمرأة والقومية

الصينية في إندونيسيا. وقد خاض نضالها الدستوري منذ فترة الاستقلال إلى مرحلة ما بعد الإصلاح، حتى وانخرط بشكل مباشر. وكان انتخاب وتعيين المرأة الصينية غير المسلمة كرئيسة إقليم لمدينة سينجاوانج في عام 2017 وسط أغلبية مسلمة يوضح أن مجتمع سينكاوانج Singkawang منفتح على أي اختلاف، وكانت إمكانية هذا الانتخاب متوقفة على عوامل تالية: (1) الكاريزما الفردية؛ (2) استيعاب التشريعات في إندونيسيا التي تعزز السرديات الجنسانية أو التكافؤ التشاركي، لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية؛ (3) السلطة الشاملة للقومية والدين والجنس؛ (4) دعم تحالف الأحزاب السياسية؛ (5) الشبكات وحشد الأموال. وأصبحت مدينة سينكاوانج Singkawang بهذا الانتخاب مدينة أكثر تسامحا من مدن أخرى في إندونيسيا، وكان ظهور المرأة الصينية غير المسلمة كرئيسة إقليم لمدينة سينكاوانج Singkawang في 2017-2022 يعد حقيقة الاعتراف الحي

الكلمات المفتاحية: سياسة الاعتراف، مدينة سينكاوانج، رئيسة إقليم،
مرأة صينية غير مسلمة

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Consonants					
ك	'	ز	z	ك	k
ا	a	س	s	ل	l
ب	b	ش	sh	م	m
ت	t	ص	ṣ	ن	n
ث	th	ذ	ḏ	و	w
ج	j	ط	ṭ	ه	h
ح	ḥ	ظ	ẓ	ي	y
خ	kh	ع	‘	ل ا	al and ‘l
د	d	غ	gh	ة	a (in construct state: -at)
ذ	dh	ف	f		
ر	r	ق	q		

Vowels					
Long	آ	ā	Short	-	a
	ي إ	ī		-	i
	و أ	ū		-	u
Doubled					
	ي-ي	iiy (final form ī)			
	و-و	uww (final form ū)			
Diphthongs					
	ي أ	ai			
	و أ	au			

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Dengan mengucapkan *bismillāh 'l-rahmān 'l-rahīm*, selesainya penulisan disertasi ini tidak terlepas dari pertolongan kasih dan sayangnya Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat yang pantas saya ucap adalah *alḥamdulillāh rabb 'l-‘ālamīn*". Salah satu bentuk nikmat-Nya adalah dapat menyelesaikan dengan tuntas disertasi yang saya tulis dengan judul **Politik Rekognisi di Indonesia: Representasi Perempuan Tionghoa Nonmuslim Menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang**. Selawat dan salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Darimin Lubis *al-maghfūrah* dan Ibu Asliah yang sangat saya cintai, terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah mendoakan dan memberikan dorongan motivasi dalam setiap langkah saya.

Perjuangan yang sangat panjang dilalui untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan kuliah doktoral di UIN Sunan Kalijaga adalah suatu kebanggaan tersendiri. Bekerja serabutan untuk dapat membayar SPP dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan perkuliahan merupakan sesuatu yang sangat berat bagi saya. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan kegelisahan saya untuk dapat meneliti topik ini. Penelitian ini sudah saya lakukan sejak tahun 2016–2017 dengan modal pengamatan saya terkait realitas politik yang terjadi saat itu. Pada tahun tersebut, secara nasional saya tidak sekedar mengamati realitas politik nasional, tetapi saya juga merespons apa yang terjadi di beberapa media elektronik *online* dalam bentuk opini. Saya melihat bahwa tidak sedikit penolakan yang terjadi dari beberapa masyarakat muslim pada saat Ahok sebagai Tionghoa nonmuslim kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Pengaruh penolakan tersebut sangat berdampak hingga aras lokal, termasuk di daerah kelahiran saya, Kalimantan Barat. Lebih-lebih, saya sangat paham betul bahwa Kalimantan Barat adalah wilayah mayoritas penduduk muslim dan

rawan konflik horizontal. Dari situ, saya menemukan satu keunikan bahwa pada pilkada Kota Singkawang tahun 2017 yang merupakan bagian dari Kalimantan Barat dengan mayoritas penduduknya ialah muslim, terdapat calon kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim dan berhasil menjadi kepala daerah terpilih. Untuk itu, ketika menjadi mahasiswa S-3 Doktor di UIN Sunan Kalijaga tahun 2019, saya memutuskan untuk memilih topik mengenai politik rekognisi di Indonesia dan mengulas lebih dalam lagi mengenai representasi perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi kepala daerah.

Selama proses perkuliahan berlangsung, selain harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kuliah, saya juga mengamati perkembangan politik yang terjadi dari tingkat nasional hingga lokal Kalimantan Barat, baik terlibat langsung sebagai aktivis organisasi dalam merespons kebijakan pemerintahan di Indonesia dan Kalimantan Barat maupun membaca beberapa literatur dan berita melalui media *online* yang berhubungan dengan kebijakan hukum dan politik nasional serta lokal di Kalimantan Barat sekitar tahun 2016–2019. Segala informasi yang terkumpul inilah saya siapkan untuk dijadikan sebagai penelitian: sebagian telah saya publikasi dalam bentuk artikel jurnal, baik nasional maupun internasional, kemudian temuan tersebut saya ulas dan dialogkan dengan disertasi yang saya tulis hingga selesai.

Disertasi yang telah ditulis ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh gelar Doktor Studi Islam. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, secara individu dan institusi ketika penulisan disertasi saya sampaikan. Terima kasih setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua promotor saya, **Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.** dan **Dr. Abdur Rozaki, M.A.** yang senantiasa memberikan waktu luangnya untuk membimbing, memberikan masukan, mendampingi, mengarahkan, mengapresiasi, dan memotivasi saya dengan segenap pikiran, kesabaran, dan konsistensinya dalam penyelesaian disertasi ini. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada beliau-beliau yang terhormat atas kebijakan, arahan, dan pertimbangan lainnya sehingga ilmu yang diperoleh ini menjadi berkat dan manfaat.

Pertama, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. dan H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.A. sebagai Direktur dan Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. dan Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A. sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kedua, terima kasih kepada yang tergabung di dalam tim pengujian ujian komprehensif, kepada Ketua Sidang yang terhormat Bapak Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D., kepada para pengujian yang terhormat Bapak Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A. dan Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

Ketiga, terima kasih kepada yang tergabung di dalam tim pengujian ujian proposal disertasi, kepada Ketua Sidang yang terhormat Ibu Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A., kepada para pengujian yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. dan Dr. Abdur Rozaki, M.Si.

Keempat, terima kasih kepada yang tergabung di dalam tim pengujian ujian pendahuluan, kepada Ketua dan Sekretaris Sidang sekaligus pengujian yang terhormat Bapak H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., Ph.D. dan Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A., kepada para pengujian Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., Bapak Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si., Ibu Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag., M.Pd., M.A., dan Ibu Dr. H. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

Kelima, terima kasih kepada yang tergabung di dalam tim pengujian ujian tertutup, kepada Ketua dan Sekretaris Sidang sekaligus pengujian yang terhormat Bapak Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. dan Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A., kepada para pengujian Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., Bapak Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si., Ibu Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag., M.Pd., M.A., Bapak Prof. Dr. H. Zaenuddin, M.A., M.A., dan Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

Keenam, terima kasih kepada seluruh dosen yang telah mengajar saya di kelas pada konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, Prodi Studi Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta selama tahun 2019–2020. Inshaallah saya mengingat betul seluruh dosen yang mengajar saya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dosen saya di **semester I**, yang terhormat kepada Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. dan Dr. Abdul Haris, M.Ag. sebagai pengajar mata kuliah Al-Qur'an dan Hadis dalam Teks dan Konteks. Kepada Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. sebagai pengajar mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Kepada Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. dan Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. sebagai pengajar mata kuliah Klinik Metodologi. Kepada Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. dan Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. sebagai pengajar mata kuliah Pendekatan dan Metode dalam Studi Islam. Kepada Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. dan Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. sebagai pengajar mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dosen saya di **semester II**, yang terhormat kepada Prof. Dr. H. Muhammad Amin Abdullah dan Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D. sebagai pengajar mata kuliah Filsafat Ilmu-ilmu Keislaman. Kepada Prof. Dr. Eusi Nurlaelawati, M.A. dan Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. sebagai pengajar mata kuliah Islam dan Kajian Sosio-Legal. Kepada Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. dan Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. sebagai pengajar mata kuliah Fiqh al-Maqasid.

Harapan saya atas ilmu yang telah diberikan dan selesainya disertasi ini dapat menjadi salah satu bagian dari berkah dan manfaat kepada siapa pun. Dengan penuh ketulusan, terima kasih dan hormat kepada seluruh pihak yang telah disebutkan. Semoga Allah Swt. memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan, amiin.

Wa Allāh 'l-muwāfiq ilā aqwāmiṭ 'l-tariq.

Wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Yogyakarta, Mei 2023

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN	iv
YUDISIUM	v
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxxii
DAFTAR SINGKATAN	xxxiii
GLOSARIUM	xxxv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teoretis	18
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II : SOSIODEMOGRAFI MASYARAKAT SINGKAWANG

A. Pengantar	33
B. Penduduk Berdasarkan Agama, Etnisitas, dan Gender di Kalimantan Barat	34
1. Penduduk Berdasarkan Agama	35

2.	Penduduk Berdasarkan Etnis atau Suku Bangsa ..	38
3.	Penduduk Berdasarkan Gender	43
C.	Sebarannya di Singkawang	45
D.	Wilayah Administrasi Masa Hindia Belanda	50
E.	Wilayah Administrasi Pascakemerdekaan hingga Pasca-Reformasi	57
F.	Singkawang dan Masyarakatnya	66
G.	Simpulan	74

BAB III : DINAMIKA PERJUANGAN PEREMPUAN DAN ETNIK TIONGHOA DALAM RUANG POLITIK

A.	Pengantar	77
B.	Agama, Etnisitas, dan Gender: Dihadapkan dengan Pluralitas	79
1.	Penduduk Berdasarkan Agama	80
2.	Penduduk Berdasarkan Etnis atau Suku Bangsa ..	82
3.	Penduduk Berdasarkan Gender	84
C.	Perempuan: Berjuang secara Konstitusional	88
1.	Dari Hak Dipilih Menuju Hak Memilih	88
2.	Masa Orde Baru Mengabaikan Konstitusi: Depolitisasi Peranan Perempuan	92
3.	Islam, Rekognisi, dan Perempuan	93
D.	Etnik Tionghoa Berjuang dalam Ruang Politik	99
1.	Nasionalisme Tionghoa: Berjuang Melalui Media Cetak.	102
2.	Pasang Surut Pengakuan terhadap Etnik Tionghoa	106
E.	Berjuang Melalui Partai Politik	107
F.	Rekognisi sebagai Perjuangan	110
1.	Implikasi Perundang-undangan atas Hak Politik Perempuan	112
2.	Representasi Etnis Tionghoa dalam Ruang Politik	117
G.	Simpulan	118

BAB IV : PEREMPUAN TIONGHOA NONMUSLIM DAN PILKADA KOTA SINGKAWANG

A. Pengantar	121
B. Representasi Kepala Daerah Perempuan dan Etnik Tionghoa	122
C. Singkawang: Kepala Daerah dan <i>Cross-Cutting</i> <i>Power</i>	133
D. Narasi Penolakan: Dampaknya pada Pilkada Kota Singkawang Tahun 2017	141
E. Faktor Terpilihnya Kepala Daerah Perempuan Tionghoa Nonmuslim di Kota Singkawang	148
1. Etnisitas	153
2. Agama	155
3. Dukungan Partai Politik	156
4. Mobilisasi Uang dan Jaringan	159
F. Simpulan	161

BAB V : RELASI BUDAYA DAN PROSES POLITIK MENJADI KEPALA DAERAH SINGKAWANG

A. Pengantar	163
B. Profil Kepala Daerah Perempuan Tionghoa Nonmuslim di Kota Singkawang	164
C. Relasi Budaya dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Singkawang	171
D. Proses Kandidasi Pilkada Kota Singkawang	179
1. Memilih Pasangan	181
2. Partai Pengusung dan Kelompok Nonpartai	184
3. Dana Kampanye	186
4. Jumlah Suara	190
E. Kepala Daerah Perempuan Tionghoa Nonmuslim di Kota Singkawang	193
F. Simpulan	197

**BAB VI: RESIPROKAL REKOGNISI SETELAH MENJADI
KEPALA DAERAH TAHUN 2017–2022 DI SINGKAWANG**

A. Pengantar	199
B. <i>Living</i> Rekognisi	201
C. Mengatasi Polarisasi	203
D. Kemanfaatan	214
E. Inovasi Kebijakan	221
F. Harmoni Masyarakat	230
G. Simpulan	239

BAB VII : Penutup

A. Kesimpulan	241
B. Saran	244

DAFTAR PUSTAKA 247

LAMPIRAN-LAMPIRAN 277

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 292



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Informan, 29
Tabel 2.1	Penduduk Berdasarkan Agama di Kalimantan Barat Tahun 1971 dan 2000, 36
Tabel 2.2	Penduduk Berdasarkan Agama di Kalimantan Barat Tahun 2010, 37
Tabel 2.3	Penduduk Berdasarkan Agama di Kalimantan Barat Tahun 2022, 38
Tabel 2.4	Keberadaan Etnis atau Suku Bangsa di Kalimantan Barat menurut Divisi (<i>Afdeeling</i>) Tahun 1930, 39
Tabel 2.5	Penduduk Berdasarkan Etnik di Kalimantan Barat Tahun 2000, 41
Tabel 2.6	Penduduk Berdasarkan Etnik di Kalimantan Barat Tahun 2010, 42
Tabel 2.7	Penduduk Berdasarkan Gender menurut Divisi/ <i>Afdeeling</i> di Kalimantan Barat Tahun 1930, 43
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk menurut Gender di Kalimantan Barat menurut Kabupaten dan Kota, Tahun 2010, 2015, dan 2020, 44
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2022, 45
Tabel 2.10	Kepala Daerah Kota Singkawang, 47
Tabel 2.11	Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Singkawang Tahun 2010, 48
Tabel 2.12	Penduduk Berdasarkan Etnis di Kota Singkawang Tahun 2005 dan 2008, 49
Tabel 2.13	Wilayah Administratif <i>Westerafdeelingen</i> Borneo Tahun 1883, 53
Tabel 2.14	Daftar Nama Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 1950–2021, 58
Tabel 2.15	Wilayah Administratif Kecamatan Singkawang Tahun 1956, 59

- Tabel 2.16 Sebaran Struktur Administrasi Kotif Singkawang sejak Tahun 1981, 61
- Tabel 2.17 Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang Tahun 1999, 62
- Tabel 2.18 Perubahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Singkawang Tahun 2003, 64
- Tabel 2.19 Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kota Singkawang Tahun 2003, 65
- Tabel 2.20 Penduduk Berdasarkan Sub-Divisi (*Onderafdeelingen*) di Singkawang Tahun 1930, 67
- Tabel 2.21 Penduduk Singkawang Berdasarkan Gender dari Berbagai Bangsa di *Afdeeling* Singkawang Tahun 1930, 68
- Tabel 2.22 Sebaran Penduduk Berdasarkan Gender di Kampung-Kampung Kecamatan Singkawang Tahun 1965, 70
- Tabel 2.23 Penduduk Berdasarkan Gender di Kota Singkawang Tahun 2015, 72
- Tabel 2.24 Penduduk Berdasarkan Agama dan Gender di Singkawang Tahun 2018, 73
- Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Indonesia Tahun 1971 dan 2000, 81
- Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Indonesia Tahun 2010, 81
- Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Etnik Tahun 1930 dan 2000, 82
- Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Etnik Tahun 2010, 83
- Tabel 3.5 Penduduk Berdasarkan Gender dan Usia di Indonesia Tahun 1971 dan 2000, 85
- Tabel 3.6 Penduduk Berdasarkan Gender menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010, 86
- Tabel 3.7 Penduduk Berdasarkan Gender menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020, 87
- Tabel 3.8 Suara Sah Partai Politik pada Pemilu Tahun 2014, 109

- Tabel 3.9 Keterwakilan Perempuan di Parlemen sejak Tahun 1950–2024, 113
- Tabel 4.1 Sebaran Penduduk Berdasarkan Agama di Indonesia Tahun 2017, 123
- Tabel 4.2 Representasi Perempuan Menjadi Kepala Daerah Tahun 2005–2016 di Indonesia, 126
- Tabel 4.3 Representasi Etnis Tionghoa dalam Ruang Politik di Lembaga Eksekutif Tahun 1946–2015, 130
- Tabel 4.4 Kepala Daerah Etnik Tionghoa di Indonesia Tahun 2003–2023, 132
- Tabel 4.5 Calon Kepala Daerah sesuai Nomor Urut di Kota Singkawang Tahun 2007, 135
- Tabel 4.6 Calon Kepala Daerah sesuai Nomor Urut di Kota Singkawang Tahun 2012, 136
- Tabel 4.7 Calon Kepala Daerah Berdasarkan Etnis pada Pilkada Tahun 2007 dan 2012, 138
- Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Singkawang Tahun 2017, 150
- Tabel 4.9 Gabungan Partai Politik yang Mendukung Pasangan Calon Tjhai Chui Mie dan Irwan sebagai Kepala Daerah Kota Singkawang Tahun 2017–2022, 157
- Tabel 4.10 Penetapan Pasangan Calon sebagai Calon Peserta, Nomor Urut, dan Daftar Pasangan Kepala Daerah Kota Singkawang dan Partai Pengusung atau Perseorangan, 158
- Tabel 4.11 Komposisi Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Berdasarkan Gender menurut Data Model C1, Pilkada Kota Singkawang Tahun 2017, 160
- Tabel 5.1 Daftar Riwayat Hidup Tjhai Chui Mie dan Irwan sebagai Calon Kepala Daerah Kota Singkawang Tahun 2017–2022, 168
- Tabel 5.2 Gabungan Partai Politik yang Mengusul Pasangan Calon Tjhai Chui Mie dan Irwan Menjadi Kepala Daerah Tahun 2017–2022, 184

- Tabel 5.3 Harta Kekayaan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Singkawang Tahun 2017, 187
- Tabel 5.4 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pilkada Kota Singkawang Tahun 2017, 189
- Tabel 5.5 Rekapitulasi Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Kota Singkawang Tahun 2017, 191
- Tabel 5.6 Hasil Penetapan Rekapitulasi KPU Kota Singkawang sesuai Nomor Urut mengenai Perhitungan Suara Pilkada Tahun 2017, 196
- Tabel 6.1 Kinerja Pemerintah Berdasarkan Pengukurannya Tahun 2020, 223
- Tabel 6.2 Indeks Kota Toleran (IKT) 2018, 232
- Tabel 6.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, 235
- Tabel 6.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020, 236



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 *Theoretical Framework* Politik Rekognisi, 21
- Gambar 1.2 Perjuangan Politik Rekognisi dalam Ruang Politik, 23
- Gambar 1.3 Implikasi Politik Rekognisi, 25
- Gambar 2.1 BPS Kota Singkawang, 46
- Gambar 2.2 Peta Elektronik Berjudul “*Residentie Wester-Afdeeling van Borneo*” dalam *Topographisch Bureau, 1889-1934*, Shelfmark: KK 089-07-01/090-01-12, 52
- Gambar 2.3 Peta Elektronik “*Kaart van den vierkanten paal gouvernement grondgebied te Singkawang* dalam, *Topographisch Bureau (Batavia)*, 1887. Shelfmark: D B 44,10, 55
- Gambar 2.4 Elektronik Berjudul “*Kaart van Singkawang en omstreken*, dalam *Topographisch Bureu*, 1887. Shelfmark D B 46, 2, 56
- Gambar 2.5 Peneliti bersama Suganda Gani, 60
- Gambar 5.1 Rumah Melayu yang Dibangun pada Masa Pemerintahan Awang Ishak dan Abdul Mutalib, 173
- Gambar 5.2 Peneliti bersama Stephanus, 174
- Gambar 5.3 Peneliti bersama Niken Tia Tantina, 179
- Gambar 5.4 Yulius Yoris Anes (Sebelah Kanan Peneliti), Peneliti, dan Stephanus (Sebelah Kiri Peneliti), 181
- Gambar 5.5 Penguatan Rekognisi, 194
- Gambar 6.1 Kominfo Kota Singkawang 25 Februari 2021, 206
- Gambar 6.2 Kominfo Kota Singkawang 27 Mei 2021, 206
- Gambar 6.3 Peneliti bersama Tjhai Chui Mie, 208
- Gambar 6.4 Suasana Malam di Halaman Kelenteng dan Gerbang “Selamat Datang Kawasan Pasang Hongkong”, 211
- Gambar 6.5 Suasana Siang Tampak Masjid Raya di Belakang Kelenteng di Pusat Kota Singkawang, 212
- Gambar 6.6 Dokumentasi Peneliti saat Observasi di Lapangan, 213
- Gambar 6.7 Peneliti bersama Irwan dan Juli Wahyudi, 219
- Gambar 6.8 Peneliti bersama Irwan, 220
- Gambar 6.9 Suasana Masjid Raya Kota Singkawang, 237

Gambar 6.10 Suasana Malam Tampak Masjid Raya di Belakang Kelenteng atau Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang, 238



DAFTAR SINGKATAN

Tidayu	: Tionghoa, Dayak, Melayu
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
RI	: Republik Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
DKI	: Daerah Keistimewaan Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
FPI	: Front Pembela Islam
DPDR	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
UUD	: Undang-Undang Dasar
ECI	: Etnis Cina Indonesia
RRC	: Republik Rakyat Cina
IHPSI	: Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
KPI	: Kongres Perempuan Indonesia
Perwani	: Persatuan Wanita Indonesia
Kowani	: Kongres Wanita Indonesia
Wani	: Wanita Negara Indonesia
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
Pemilu	: Pemilihan umum
THHK	: Tiong Hoa Hwee Koan
CHH	: Chung Hwa Hui
PTI	: Partai Tionghoa Indonesia
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
DPR	: Dewan Permusyawaratan Rakyat
PKI	: Partai Komunis Indonesia
Gestapu	: Gerakan Tiga Puluh September
SKBRI	: Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
Inpres	: Instruksi Presiden

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Golkar	: Golongan Karya
UU	: Undang-Undang
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PAN	: Partai Amanat Nasional
FKPPI	: Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri
MABM	: Majelis Adat Budaya Melayu
DAD	: Dewan Adat Dayak
GP Ansor	: Gerakan Pemuda Ansor
PAD	: Pemuda Adat Dayak



GLOSARIUM

- Ethno-Religious* : Kelompok etnis yang juga disatukan oleh latar belakang agama
- NKRI *Bersyariah* : Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada hukum Islam
- Khilafah* : Pemerintahan transnasional yang berdasarkan pada syariat Islam
- Rekognisi : Pengakuan
- Politik rekognisi : Upaya mendapatkan pengakuan. baik dari individu, kelompok, maupun negara.
- Mutual rekognisi : Kesalingpengakuan
- Resiprokal rekognisi : Pengakuan timbal balik
- Living* rekognisi : Pengakuan yang hidup di dalam masyarakat dan negara
- Paritas Partisipatif : Kesamaan dalam hal yang berhubungan dengan partisipasi
- Hakka* : Salah satu klan atau kelompok bahasa yang sebagian besar ada di Kalimantan Barat. Asal klan atau kelompok bahasa ini di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Provinsi Guandong. Pemerintah Hindia Belanda menyebutnya “*Khek*”
- Cap Go Meh* : Salah satu tradisi yang berhubungan dengan perayaan penutupan tahun baru Imlek yang memiliki arti ‘malam ke-15’ (*Cap:10, Go: 5, Meh: malam*).
- Fiqh/Fikih* : Ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam
- Double minority* : Minoritas ganda
- Triple minority* : Sebutan seseorang yang masuk ke dalam tiga status minoritas
- Pribumi : Disebut juga bumiputra atau penduduk asli dari wilayahnya

Sosiokultural	: Berkaitan dengan sosial dan kebudayaan masyarakat
Ekonomi-politik	: Berkaitan dengan ekonomi dan politik sebagai kekuatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan
Legal-formal	: Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan
Reifikasi	: Gejala kultural yang mulanya estetis berubah menjadi ekonomis
Islamisme	: Ideologi yang mencirikan representasi Islam dengan tujuan nonreligius
Islami	: Sifat substantif mencirikan keislaman
Fikih <i>siyasah</i>	: Ilmu yang berhubungan dengan politik pemerintahan atau ketatanegaraan Islam
<i>Maqashid syari'ah</i>	: Tujuan dalam syariat atau peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan alam dan Allah Swt. yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadis.
<i>Kully</i>	: Perihal yang bersifat universal
<i>Juz'iy</i>	: Perihal yang bersifat partikular
<i>Qath'i</i>	: Perihal fundamental yang pasti dan tetap
<i>Zanni</i>	: Perihal relatif yang bersifat tidak pasti
<i>Auliya'</i>	: Aliansi atau rekan
Inklusi	: Sikap terbuka
Negosiasi	: Proses perundingan untuk mencapai kesepakatan tertentu secara bersama-sama dengan pihak tertentu
Manipulasi	: Upaya memengaruhi individu atau kelompok tanpa disadari
Sosio-legal	: Berkaitan dengan sosial dan hukum yang hidup di dalam masyarakat
<i>Westerafdeelingen</i>	: Kalimantan Barat
<i>Borneo</i>	
<i>Afdeeling</i>	: Divisi
<i>Onderafdeeling</i>	: Sub-divisi

<i>Controleur</i>	: Jabatan pemerintahan atau inspektur pada masa Hindia Belanda yang bertugas sebagai koordinator pengawas sampai tingkat paling rendah
<i>Residen</i>	: Gelar pejabat pemerintah Hindia Belanda yang memiliki residensi
<i>Asisten Residen</i>	: Jabatan pegawai negeri dalam pemerintah Hindia Belanda di suatu divisi (<i>afdeeling</i>)
<i>Swapraja</i>	: Wilayah atau daerah yang memiliki pemerintahannya sendiri atau daerah otonom
<i>Gemeenteraad</i>	: Dewan-Kota
<i>Volksraad</i>	: Dewan-Rakyat
<i>Volkstelling</i>	: Sensus
<i>Een vrouw</i>	: Satu istri
<i>Twee vrouwen</i>	: Dua istri
<i>Drie vrouwen</i>	: Tiga istri
<i>Vier vrouwen</i>	: Empat istri
<i>Onbekend aantal vrouwen</i>	: Jumlah istri yang tidak diketahui
<i>Inlanders</i>	: Pribumi, bumiputra, atau penduduk asli yang berasal dari wilayahnya
<i>Vreemde Oosterlingen</i>	: Penduduk Timur asing
<i>Vreemde Westerlingen</i>	: Penduduk Barat Asing
<i>Nederzettingen van Malaische zeeeroovers</i>	: Pemukiman bajak laut Melayu
<i>Geislamiseerde Dajak's</i>	: Dayak Islam yang menyebut dirinya Melayu
<i>Actief Kiesrecht</i>	: Hak memilih
<i>Passief Koesrecht</i>	: Hak untuk dipilih
<i>Staatsblad</i>	: Kumpulan peraturan perundang-undangan dari pemerintah Hindia Belanda yang memiliki tahun dan nomor
<i>Nederlandsch Indie</i>	
<i>Druipers</i>	: Mesin cetak
<i>San Kheu Yong</i>	: Nama Singkawang yang berasal dari kata <i>Shan</i> : Gunung, <i>Kou</i> : Sungai,

	<i>Yang</i> : Lautan— atau disebut gunung di mulut lautan
<i>Barong Sai</i>	: Tarian tradisional Tionghoa
<i>Liong</i>	: Gambar naga buatan saat perayaan tahun baru Imlek
<i>Geislamiseerde Dajak's</i>	: Dayak Islam yang menyebut dirinya Melayu
<i>Koncowingking</i>	: Peran istri yang tugasnya sebagai pelengkap suami yang posisinya di belakang layar
Deputisasi paralel	: Utusan atau perwakilan yang beri hak untuk mewakili
<i>Cross-cutting power</i>	: Strategi silang menyilang kekuatan
<i>Religious nation-state</i>	: Negara yang berkeagamaan
<i>Commondweal</i>	: Kemaslahatan bersama
<i>Welfarestate</i>	: Negara kesejahteraan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan agama, etnisitas, dan gender di Indonesia hingga saat ini masih menjadi masalah krusial terkait politik, termasuk di Kalimantan Barat, seperti masyarakat *tidayu* (Tionghoa, Dayak, dan Melayu) yang merupakan kelompok etnis terbesar di Kalimantan Barat. Setiap kelompok etnis tersebut memiliki kepercayaan agama masing-masing.¹ Hal ini dapat memengaruhi dinamika politik dan proses perubahan sosial. Oleh sebab itu, masyarakat *tidayu* merupakan bagian dari sumber daya yang potensial,² seperti penguatan pola identifikasi *ethno-religious* yang berkaitan dengan solidaritas dan cenderung mempertajam konflik horizontal.³ Salah satunya dapat ditandai dengan identifikasi muslim dan nonmuslim,⁴ pribumi dan nonpribumi. Penguatan identitas keagamaan dan primordialisme dalam kacamata nasional secara konstelasi kelas ditandai dengan perjuangan untuk mengislamkan konstitusi dan membatasi hak-hak

¹ Zaenuddin Hudi Prasajo, "Moderate Islam and the Social Contraction of Multi-Ethnic Communities in the Hinterland of West Kalimantan," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (2019): 223.

² Zaenuddin Hudi Prasajo, "Social Change and the Contributions of the Tionghoa, Dayak and Melayu (Tidayu) in West Kalimantan," dalam *Borneo Studies in History, Society and Culture*, ed. Victor T. King, Zawawi Ibrahim, dan Noor Hasharina Hassan (Singapore: Springer Science+Business Media Singapore, 2017), 427, 442.

³ Syarif Ibrahim Alqadrie, *Matahari Akan Terbit di Barat: Kumpulan Karangan Terpilih Sejak 1986-2010* (Pontianak: Yayasan Insan Cita Kalimantan Barat, 2008); Syarif Ibrahim Alqadrie, *Kalimantan dan Kalimantan Barat: Potensi, Fenomena, dan Dinamika Sosial Budaya dan Politik dan Tantangan ke Depan* (Pontianak: Yayasan Insan Cita Kalimantan Barat, 2011).

⁴ Zaenuddin Hudi Prasajo, "Indigenous Community Identity within Muslim Societies in Indonesia: A Study of Katab Kebahan Dayak in West Borneo," *Journal of Islamic Studies* 22, no. 1 (2011): 50–65.

nonmuslim.⁵ Lebih dari itu, pada konteks yang senada adalah kebencian terhadap orang Tionghoa dan Kristen makin mengkristal, khususnya persoalan “anti-Cina” yang mulai tumbuh kembali pada kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode tahun 2014–2019, selain daripada masalah investasi, juga masalah anti komunis.⁶ Bisa jadi, menurut Terry Lovell,⁷ pandangan tersebut dikatakan ingin mewujudkan sebuah struktur dan hubungan ekonomi serta perbedaan budaya yang dilembagakan dalam tatanan status.

Pola penguatan identifikasi *ethno-religious* akan berdampak pada dinamika sosial masyarakat dengan ditandainya representasi, interpretasi, dan komunikasi,⁸ yang tentunya dapat merambat dalam ruang politik, seperti diskursus kepemimpinan perempuan dalam Islam dan kepemimpinan etnis Tionghoa (nonmuslim), khususnya di Indonesia sebagai penduduk mayoritas muslim.

Hal tersebut memberikan ruang untuk lebih mengulas pembahasan mengenai pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pilkada) di Kota Singkawang pada tahun 2017 atas keterpilihan pasangan Tjhai Chui Mie dan H. Irwan (2017–2022).⁹ Penting diketahui bahwa Tjhai Chui Mie merupakan seorang perempuan Tionghoa nonmuslim yang menjadi Kepala Daerah Singkawang di tengah penduduk mayoritas muslim. Kemunculannya sejurus dengan menguatnya gerakan islamisme pada politik nasional dan regional

⁵ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, Ed. revisi. (Yogyakarta: CRCS, 2018), 1–9, 11–36, 37–71, 73–109.

⁶ Greg Fealy, “Bigger than Ahok: Explaining the 2 December Mass Rally,” *Indonesia at Melbourne*, 7 Desember 2016, diakses 31 Mei 2020, <https://indonesiatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/>.

⁷ Terry Lovell, “Introduction,” dalam *(Mis)Recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu*, ed. Terry Lovell (London, New York: Routledge, 2007), 4.

⁸ Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition* (New York, London: Routledge, 1997), 14.

⁹ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017.

Kalimantan Barat. Di sisi lain, dalam kajian politik menurut Eric Hiariej dan Kristian Stokke,¹⁰ metode dan prosedur memilih representasi politik cenderung menjadi proyek kajian tentang demokrasi (atau bagian dari proses demokratisasi). Ranah tersebut cenderung mengabaikan isu yang berhubungan dengan kekuasaan antara berbagai kelompok dan kelas masyarakat sehingga berdampak pada pengabaian diskursus mengenai kesejahteraan yang dihadapi masyarakat secara umum.

Persoalan keterlibatan perempuan dan etnis Tionghoa dalam ruang politik di Indonesia selalu berada pada arena yang kurang menguntungkan. Sekadar contoh tentang hambatan partisipasi perempuan dalam ruang politik seperti di Mesir pada pemilihan parlemen tahun 2015, peran kelembagaan *National Council for Women*¹¹ belum maksimal,¹² sistem kuota parlementer di dalam perundang-undangan (*Egyptian legal/constitutional framework*) tidak menguntungkan, dan masalah sosial-budaya di Mesir. Setelah itu, di negara Afganistan adanya faktor ideologis,¹³ meskipun dalam *Afghan constitution* Pasal 22 menyebutkan hak laki-laki dan perempuan adalah setara. Negara bagian Yobe (negara bagian di Nigeria) juga menghambat partisipasi perempuan dalam ruang politik,¹⁴ meliputi diskriminasi, kurangnya pendidikan yang memadai untuk perempuan, masalah keuangan atau kemiskinan bagi perempuan, persoalan agama-sosial-budaya, persoalan rumah tangga, minat politik yang

¹⁰ Eric Hiariej dan Kristian Stokke, "Introduction: Politics of Citizenship in Indonesia," dalam *The Politics of Citizenship in Indonesia*, ed. Eric Hiariej dan Kristian Stokke (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 2.

¹¹ National Council for Woman (NCW) adalah salah satu lembaga pemerintah di Mesir. Lembaga ini "mungkin" sepadan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPI).

¹² Amany A. Khodair dan Bassant Hassib, "Women's Participation in Egypt: The Role of the National Council for Woman," *International Journal of Political Science and Development* 3, no. 7 (2015): 326–337.

¹³ Muhammad Ibrahim dan Razia Mussarat, "Women Participation in Politics: A Case Study of Afghan Women," *Journal of Public Administration and Governance* 4, no. 3 (2014): 433–447.

¹⁴ Ishaku Hamidu dan Mustapa Alhaji Ali, "Challenges of Women Participation in Politics of Yobe State, Nigeria," *Sahel Analyst: Journal of Management Sciences* 16, no. 4 (2018): 98–110.

rendah, dan patriarkalisme. Setelah itu, negara Somalia,¹⁵ di Kota Garowe (negara bagian Puntland) mengenai skema politik yang berbasis klan. Pada kasus populisme Eropa, misalnya, populisme kiri di Spanyol (*Podemos*) dan populisme kanan di Finlandia (*The Finns Party*)¹⁶ masih mencerminkan praksis politik yang dijiwai dengan dominasi laki-laki dan konfrontatif.

Pemilihan Presiden RI pada Juni tahun 1999,¹⁷ pencalonan Megawati sebagai calon presiden juga mendapatkan penolakan. Begitu juga di aras lokal, contohnya, beberapa dari kalangan ulama dayah di Kota Langsa¹⁸ menolak keterwakilan dari perempuan sebagai pemimpin atau kepala daerah. Begitu juga dengan kasus di Kota Tasikmalaya,¹⁹ terjadi hal yang sama karena faktor agama, sosial, dan budaya. Di Provinsi Jambi,²⁰ masih kuatnya struktur patriarki. Hal ini bagi Nancy Fraser²¹ menggambarkan bahwa ketidakadilan gender masih ditutupi oleh watak androsentrisme.

¹⁵ Mohamed Ahmed Abdi, Hellen K. Mberia, dan Willy Muturi, "Determinants of Women's Participation in Politics: A Case Study from Garowe City Puntland-Somalia," *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)* 3, no. 13 (2016): 166–170.

¹⁶ Johanna Kantola dan Emanuela Lombardo, "Populism and Feminist Politics: The Cases of Finland and Spain," *European Journal of Political Research* 58, no. 4 (2019): 1108–1128.

¹⁷ Yunahar Ilyas, "Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Tinjauan Tafsir Al-Qur'an," *Tarjir* 3, no. 1 (2002): 63–73; Siti Robikah, "Kepemimpinan Politik Wanita dalam Perspektif Fatima Mernissi," *El-Hikam* 12, no. 2 (2019): 289; Rahmani Timorita Yulianti, "Kepemimpinan Wanita di Indonesia Perspektif Budaya dan Agama," *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 27, no. 52 (2004): 191; Yusuf Fadli, "Islam, Perempuan, dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (2018): 43–44.

¹⁸ Muhajir, "Kepemimpinan dalam Islam," *Al-Qadha* 5, no. 2 (2019): 9–18.

¹⁹ Noneng Masitoh, "Gerakan dan Representasi Politik Perempuan di Kota Tasikmalaya," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2016): 226–227.

²⁰ Zarfinayenti, "Partisipasi Perempuan dalam Politik: Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan dalam Politik di Provinsi Jambi Masa Reformasi Sampai Sekarang (Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 233.

²¹ Nancy Fraser, "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation," dalam *Redistribution or*

Penolakan lainnya tentang pemimpin nonmuslim,²² misalnya keterwakilan etnis Tionghoa di Indonesia, seperti ditandai dengan penolakan terhadap pemimpin Tionghoa nonmuslim. Beberapa penelitian saya²³ menyebutkan bahwa pada saat fenomena “Aksi Bela Islam”, di dalamnya terdapat gagasan “NKRI Bersyariah” dan “Khilafah”. Hal ini terjadi sebelum pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 mengenai sosok Basuki Tjahaja Purnama (disebut Ahok) sebagai calon gubernur nonmuslim beretnis Tionghoa,²⁴ yang dianggap sebagai etnis minoritas dan nonpribumi di Indonesia.²⁵

Pembahasan tersebut mengulas bahwa perempuan, etnis Tionghoa, dan nonmuslim masih mengalami penolakan dan hambatan dari aspek sosial masyarakat. Untuk itu, persoalan representasi, penafsiran, dan komunikasi merupakan faktor penting dalam persoalan ketidakadilan.²⁶ Penjelasan tersebut memberikan sudut pandang bahwa keterwakilan perempuan dan etnis Tionghoa di Indonesia masih cenderung mengalami hambatan yang cukup serius dalam ruang politik.

Recognition? A Political-Philosophical Exchange, ed. Nancy Fraser dan Axel Honneth, terj. Joel Golb, James Ingram, dan Christiane Wilke (London, New York: Verso, 2003), 20–21.

²² Mary Silvita, “Presiden Non-Muslim dalam Komunitas Masyarakat Muslim,” *Jurnal Islamica* 7, no. 1 (2012): 47; Abu Tholib Khalik, “Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 60.

²³ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, “Rethinking the Book of Al-’Aql Al-Siyasi Al-’Arabi and Indonesian Political Phenomenon,” *Jurnal Penelitian* 17, no. 1 (2020): 67–80; Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, “Religious Nation State: Bahtiar Effendy and Islamic Political Thought,” *Millah: Jurnal Studi Agama* 19, no. 2 (2020): 167–198; Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, “Contestation on Political Space between Islamism and Islamic Group in Presidential Election 2019,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2020).

²⁴ Muzayyin Ahyar dan Alfitri, “Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 4.

²⁵ M. D. La Ode, *Trilogi Pribumisme: Resolusi Konflik Pribumi dengan Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia* (Jakarta: Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia, 2018).

²⁶ Nancy Fraser, “From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a ‘Post-Socialist’ Age,” *New Left Review*, no. 212 (1995): 71.

Topik penelitian ini membahas politik rekognisi yang muncul akibat persoalan tidak adanya pengakuan atau salah pengakuan (*misrecognition*)²⁷ atas partisipasi perempuan dalam ruang politik. Hal lainnya mengenai penindasan pada ras tertentu dan keagamaan tertentu dalam persoalan multikulturalisme. Karena itu, bagi Lydia Lewis,²⁸ politik rekognisi sangat berkaitan dengan dominasi budaya, simbol keagamaan, dan ketidakadilan (baik sosial, ekonomi, maupun representasi politik). Hal tersebut menghendaki perlunya perjuangan untuk mendapatkan pengakuan²⁹ secara paritas partisipatif, integritas, dan kebutuhan vital sebagai manusia,³⁰ baik itu di institusi negara maupun pranata sosial (Islam).

Sistem hukum tata negara di Indonesia menegaskan bahwa politik rekognisi terhadap warga negara telah terakomodasi di dalam konstitusi, disebut juga sebagai “paritas partisipatif”³¹. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Di luar itu, meskipun perempuan mendapat pengakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, pada kenyataannya ketimpangan dan subordinasi selalu muncul,³² baik secara sosial, politik, agama, maupun budaya, dengan upaya mengingkari hak-hak perempuan.

²⁷ Charles Taylor, “The Politics of Recognition,” dalam *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, ed. Amy Gutmann (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994), 25, 36, dan 37.

²⁸ Lydia Lewis, “Politics of Recognition: What Can a Human Rights Perspective Contribute to Understanding Users’ Experiences of Involvement in Mental Health Services?” *Social Policy & Society* 8, no. 2 (2009): 257–274.

²⁹ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, terj. Joel Anderson (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1995); Axel Honneth, “Integrity and Disrespect: Principles of a Conception of Morality Based on the Theory of Recognition,” *Political Theory* 20, no. 2 (1992): 187–201.

³⁰ Nancy Fraser, “Recognition without Ethics?” *Theory, Culture & Society* 18, no. 2–3 (2001): 21–42; Honneth, “Integrity and Disrespect,” 188–192; Taylor, “The Politics of Recognition,” 26.

³¹ Fraser, “Social Justice,” 42.

³² Taylor, “The Politics of Recognition,” 63.

Permasalahan tersebut berhubungan dengan penjelasan sebelumnya mengenai keterwakilan perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi kepala daerah di Kota Singkawang. Misalnya, hasil wawancara dari beberapa masyarakat Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan upaya untuk menghambat partisipasi perempuan di ruang politik terjadi pada saat pilkada tahun 2017 di Kota Singkawang, baik dengan mengatasnamakan agama, etnis, maupun gender.³³ Identifikasi *ethno-religious* cenderung menguat³⁴ dan mengalami pro-kontra dengan memunculkan konflik dalam ruang politik³⁵ seperti keterwakilan Tjhai Chui Mie sebagai perempuan, Tionghoa,³⁶ (Hakka),³⁷ nonmuslim,³⁸ yang menjadi

³³ Wawancara, Ghazali, melalui pesan WhatsApp dan pertemuan langsung di Kota Singkawang.

³⁴ Imtiyaz Yusuf, "Managing Religious and Ethnic Diversity for Peace and Harmony: Islam and Buddhism in The Malay World of South East Asia," *Journal of Malay Islamic Studies* 1, no. 2 (2017): 129–140.

³⁵ Imtiyaz Yusuf, "The Southern Thailand Conflict and the Muslim World," *Journal of Muslim Minority Affairs* 27, no. 2 (2007): 324.

³⁶ Istilah "Cina" disematkan seperti mempunyai kesan merendahkan, terasa kasar, dan mengandung arti penghinaan. Bahkan, di Jawa untuk memperhalusnya sebagai kesan sopan disebut dengan kata *cinten*. Hari Purwanto, *Cina Khek di Singkawang*, ed. ke-2 (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 114–122. Lebih tepatnya, penulis menggunakan istilah "Tionghoa" di sini mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967.

³⁷ Istilah "Hakka" digunakan sebagai salah satu nama "klan" dan "suku bangsa" di negara Cina. Purwanto, *Cina Khek di Singkawang*; M. Ikhsan Tanggok, *Agama dan Kebudayaan Orang Hakka di Singkawang* (Jakarta: Kompas, 2017). Sebagian besar etnis Tionghoa di Kalimantan Barat berasal dari daerah Provinsi Guangdong, Cina bagian selatan, yang merupakan komunitas kelompok berbahasa "Hakka". Mary Somers, *Penambang Emas, Petani dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat* (Jakarta: Yayasan Nabil, 2008); Purwanto, *Cina Khek di Singkawang*, 154. Umumnya pemerintah kolonial Hindia Belanda menyebut "Hakka" sebagai "Khek". Any Rahmayani, *Pemukiman Tionghoa di Singkawang dari Masa Kongsi hingga Masa Kolonial* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 18.

³⁸ Hasil pelacakan Kurniawati Hastuti Dewi mengenai agama Tjhai Chui Mie menunjukkan, "*She believes in Confucianism, although her identity card states she is a Buddhist*". Kurniawati Hastuti Dewi, "Chinese Indonesian Women in Local Politics: The Political Rice Tjhai Chui Mie in Singkawang," *Asian Women* 35, no. 2 (2019): 58.

kepala daerah pertama di Kota Singkawang periode tahun 2017–2022, bahkan di Indonesia. Hal ini bersamaan hadir saat polemik Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 sehingga penting untuk menjadi sorotan dalam kajian politik rekognisi di Indonesia.

Kota Singkawang pernah mengalami beberapa peristiwa terkait hubungan beragama, seperti 1) kasus pelemparan bom molotov di Vihara Budi Dharma Singkawang pada tahun 2016;³⁹ 2) perayaan *Cap Go Meh* yang ditandingi dengan pawai akbar dalam rangka Maulud Nabi Muhammad saw. oleh organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (selanjutnya disebut KNPI) dan Front Pembela Islam (selanjutnya disebut FPI) Kota Singkawang;⁴⁰ 3) beredarnya kalender berlogo “Palu Arit” (identik dengan logo partai komunis), yang sebagian kecil kalender tersebut dibagikan oleh Tjhai Cui Mie (saat menjabat sebagai anggota DPRD Singkawang periode 2014–2019);⁴¹ 4) sebelum itu, pernah juga terjadi pada tahun 2008 mengenai tulisan Hasan Karman (Kepala Daerah Kota Singkawang periode tahun 2007–2012), yang mengatakan bahwa pada masa kolonial, sekelompok orang Melayu adalah perompak.⁴² Hal tersebut meniscayakan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang masih belum terbuka secara sosiokultural, adanya stereotipe yang tinggi,

³⁹ Yohanes Kurnia Irawan, “Wihara di Singkawang Dilempar Botol Diduga Bom Molotov,” *Kompas.com*, 14 November 2016, diakses 14 Desember 2019, <https://regional.kompas.com/read/2016/11/14/16333331/vihara.di.singkawang.dilempar.botol.diduga.bom.molotov?page=all>.

⁴⁰ Joko Tri Haryanto, “Interaksi dan Harmoni Umat Beragama,” *Walisono* 20, no. 1 (2012): 226–227.

⁴¹ Novi Saputra, “Bagikan Seribu Kalender Berlambang Palu Arit, Ini Tanggapan Dewan Singkawang,” *Tribun Pontianak*, 30 Juni 2016, diakses 16 Desember 2018, <https://pontianak.tribunnews.com/2016/06/30/bagikan-15-ribu-kalender-yang-berlambang-palu-arit-ini-tanggapan-dewan-singkawang>.

⁴² Agni Malagina, “Singkawang: Kami Juga Ingin Hidup Tenang”. 27 November 2010, diakses 14 Desember 2019, <https://staff.blog.ui.ac.id/agni.malagina/2010/11/27/singkawang-kami-juga-ingin-hidup-tenang/>.

etnosentris, misrekognisi, kecemburuan sosial, ekonomi, dan lainnya yang memicu kesenjangan.⁴³

Kota Singkawang menjadi lokasi penting dalam penelitian ini karena dihuni oleh mayoritas penduduk muslim.⁴⁴ Jika mayoritas penduduk beragama Islam, pandangan keagamaan akan memberikan pengaruh bagi masyarakat.⁴⁵ Pengaruhnya berasal dari pandangan dan persepsi ulama.⁴⁶ Jumlah keberadaan penduduk Kota Singkawang secara mayoritas adalah etnis Tionghoa.⁴⁷ Di sisi lain, dari sejumlah pengakuan masyarakat *tidayu*, Melayu identik dengan Islam, ibarat “dua sisi mata uang”, sehingga orang Dayak dan Tionghoa yang memeluk agama Islam disebut sebagai orang Melayu.⁴⁸ Istilah ini sudah menjadi rahasia umum dalam masyarakat *tidayu* (akan dijelaskan pada bab 2).

Informasi mengenai komposisi pemilih pada pilkada Kota Singkawang tahun 2017, sebanyak 79.018 pemilih laki-laki dan 78.153 pemilih perempuan.⁴⁹ Calon kepala daerah secara gender

⁴³ Amalia Irfani, “Pola Kerukunan Melayu dan Tionghoa di Kota Singkawang,” *Al-Hikmah* 12, no. 1 (2018): 12.

⁴⁴ Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010, Provinsi Kalimantan Barat, “Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut Provinsi Kalimantan Barat,” diakses 14 Desember 2019, www.sp2010.bps.go.id.

⁴⁵ Fadli, “Islam, Perempuan, dan Politik,” 43.

⁴⁶ Sunarwoto, “Ulama, Fragmentasi Otoritas, dan Imajinasi Negara-Bangsa: Studi Kasus Pontianak,” dalam *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-Kota Indonesia*, ed. Ibnu Burdah, Najib Kailani, dan Munirul Ikhwan (Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019), 339.

⁴⁷ M. D. La Ode, *Etnis Cina Indonesia dalam Politik: Politik Etnis Cina Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 18.

⁴⁸ Hal ini pernah dibahas saat peneliti menjadi peserta ketika seminar sejarah yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Adab (HIMADAB) STAI Sambas dengan tema “*Potret Sejarah Kesultanan Melayu Sambas: Eksistensi, Harapan, dan Tantangan Menuju Sambas Gemilang*,” di Aula Kantor Bupati Kabupaten Sambas, 25 Juni 2013. Dayak masuk Islam menjadi orang Melayu. Yeti Manuakti, *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan* (Yogyakarta: LKiS, 2006). Tionghoa masuk Islam menjadi orang Melayu. Dewi, “Chinese Indonesian Women,” 61.

⁴⁹ Menurut data Model C1, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang. “Pemilih dan Pengguna Hak Pilih”. Lihat selengkapnya pada

terdiri dari 2 calon wali kota dari laki-laki, yaitu Abdul Mutalib nomor urut 3 dan Andi Syarif nomor urut 4, dan ada 2 calon wali kota dari perempuan, yaitu Tjhai Nyit Kim nomor urut 1 dan Tjhai Chui Mie nomor urut 2.⁵⁰ Hal ini menjadi menarik untuk dibahas dalam kajian politik rekognisi karena pemilih dan calon Kepala Daerah Kota Singkawang secara gender adalah seimbang.

Rekognisi pada dasarnya membahas mengenai hak kewarganegaraan, politik identitas, redistribusi, dan tuntutan untuk mengantisipasi atau mengatasi konflik masa lalu.⁵¹ Untuk itu, diskursus mengenai keterwakilan perempuan Tionghoa nonmuslim sebagai Kepala Daerah Kota Singkawang periode tahun 2017–2022 tidak terlepas dari relasi antara berbagai kelompok dan kelas yang ada dalam masyarakat. Respons dari masyarakat perlu diulas dalam penelitian ini. Sekalipun itu memiliki perbedaan pandangan, tentu dengan komunikasi melalui akar rumput dapat mendapatkan sebuah pemaknaan yang berbeda dan baru dari masyarakat *tidayu*, misalnya respons masyarakat muslim di Kota Singkawang. Ruang sosial masyarakat perlu dijumpai dan didengar karena dalam perspektif sosial, pengalaman dan afiliasi yang berbeda pasti ada di dalam masyarakat tersebut⁵² sebagai bentuk dari politik rekognisi. Jadi, politik rekognisi terhadap keterwakilan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim perlu penelusuran bolak-balik, baik dari sisi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/kalimantan_barat/kota_singkawang, diakses pada 8/24/2020.

⁵⁰ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017.

⁵¹ Janice McLaughlin, Peter Philimore, dan Diane Richardson, "Introduction: Why Contesting Recognition?" dalam *Contesting Recognition: Culture, Identity and Citizenship*, ed. Janice McLaughlin, Peter Philimore, dan Diane Richardson (London, England: Palgrave Macmillan, 2011), 1.

⁵² Iris Marion Young, *Justice and the Politic of Difference* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990), 119.

afeksi, hak, maupun solidaritas,⁵³ sebagai bagian dari afirmasi kesalingpengakuan (*mutual recognition*).⁵⁴

Penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang muncul di balik keterpilihan Tjhai Chui Mie? Hal tersebut perlu pemahaman lebih lanjut mengenai sosok kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim yang berjuang agar mendapatkan pengakuan dalam ruang politik. Keberadaan jaringan etnik dapat mengantarkan kajian politik rekognisi untuk mendalami aras sosial masyarakat dan legal-formal di Kota Singkawang.

Berangkat dari permasalahan di atas, masyarakat *tidayu* di Kalimantan Barat mengalami penguatan identifikasi *ethno-religious*. Tentu hal ini mempunyai dua citra yang potensial, yaitu solidaritas dan adanya kecenderungan mempertajam konflik horizontal, seperti ditandai dengan identifikasi muslim dan nonmuslim, pribumi dan nonpribumi, setempat dan pendatang. Hal tersebut berdampak pada representasi, interpretasi, dan komunikasi. Sekali lagi ditegaskan bahwa topik utama penelitian ini adalah politik rekognisi di Indonesia yang mengulas keterwakilan perempuan dan etnis Tionghoa nonmuslim dalam ruang politik di Indonesia. Masih di dalam episode yang sama, pembahasan mengenai masyarakat *tidayu* di Kota Singkawang sebagai penduduk mayoritas muslim muncul arus baru pada pilkada di wilayah Kalimantan Barat. Arus baru tersebut adalah keterwakilan perempuan Tionghoa nonmuslim yang secara resmi menjadi kepala daerah pertama di Kalimantan Barat dan mungkin di Indonesia dalam sejarah politik Indonesia modern. Persoalan mengenai keterwakilan perempuan dan etnis Tionghoa (nonmuslim) di tengah mayoritas muslim pada kenyataannya berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam ruang politik di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya dinamika hukum Islam dan pranata sosial, baik dari perspektif agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun perundang-undangan. Upaya untuk mengungkapkannya dalam

⁵³ Honneth, *The Struggle for Recognition*, 92–130.

⁵⁴ Robert R. Williams, “Aristotle and Hegel on Recognition and Friendship,” dalam *The Plural States of Recognition*, ed. Michel Seymour (England, London: Palgrave Macmillan, 2010), 20–36.

realitas sosial masyarakat dan legal-formal, secara khusus di Kota Singkawang, yang berkaitan dengan representasi, interpretasi, dan komunikasi terhadap keterwakilan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang periode 2017–2022, inilah yang dimaksud sebagai pembahasan dalam politik rekognisi.⁵⁵

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab beberapa persoalan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, diperlukan perumusan masalah ke dalam beberapa pertanyaan berikut. *Pertama*, dinamika konteks seperti apakah perempuan dan etnik Tionghoa nonmuslim mendapatkan ruang dalam politik di Indonesia sehingga perempuan Tionghoa nonmuslim terpilih menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang? *Kedua*, bagaimana relasi budaya dan proses politik yang berlangsung dari proses keterpilihan tersebut? *Ketiga*, bagaimana resiprokal rekognisinya setelah menjadi kepala daerah di Kota Singkawang dalam penguatan keberagaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap realitas sosial masyarakat dan legal-formal mengenai perempuan Tionghoa nonmuslim yang terpilih menjadi kepala daerah di Kota Singkawang. Ada beberapa bagian penting yang dapat digarisbawahi dalam penelitian ini sebagai signifikansinya secara teoretis adanya pemetaan kajian politik rekognisi. *Pertama*, walaupun penelitian ini tampak dipusatkan pada kelompok muslim Singkawang, analisisnya tidak terlepas dari perkembangan sejarah berkaitan dengan perjuangan perempuan dan etnik Tionghoa di Indonesia. Selain itu, secara garis besar, penelitian ini juga mengulas realitas masyarakat *tidayu* di Kalimantan Barat umumnya dan Singkawang khususnya, dari masa pemerintahan Hindia Belanda, pascakemerdekaan, hingga pascareformasi. Struktur wilayah administrasi Singkawang juga dibahas dalam penelitian ini.

⁵⁵ Penjelasan tentang politik rekognisi dibahas pada kerangka teori.

Selanjutnya, melihat formasi politik di Kota Singkawang dalam konteks kepala daerah.

Kedua, selain mengulas proses politik dan relasi budaya dalam keterpilihan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim, juga menyelami dinamika politik di Indonesia pada 2016–2020 dan dampaknya di Kalimantan Barat. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui perjuangan perempuan Tionghoa nonmuslim untuk mendapat pengakuan menjadi kepala daerah dan tahapan kandidasi pada pilkada di Kota Singkawang juga dibahas di bagian ini.

Ketiga, respons masyarakat muslim dan *tidayu* sangat penting untuk dipahami karena menurut hasil wawancara dengan Fahmi sebagai aparatur sipil negara dan Kepala Bidang di lingkungan Bappeda Kota Singkawang, setelah terpilihnya menjadi kepala daerah, Singkawang mendapat julukan sebagai Kota Tertoleran dan Kota Pusaka. Hal tersebut bersamaan dengan hadirnya penolakan Ahok sebagai calon Kepala Daerah di DKI Jakarta, yang ditandai dengan menguatnya identifikasi muslim dan nonmuslim, pribumi dan nonpribumi, lokal dan pendatang, baik dalam politik nasional maupun regional.

Signifikansi secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya studi Islam pada konsentrasi ilmu hukum dan pranata sosial Islam, misalnya dijadikan sebagai materi dalam mata kuliah kajian *socio-legal*. Artinya, penelitian ini melengkapi riset sebelumnya dan menjadi rujukan peneliti selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang keterlibatan perempuan dan etnis Tionghoa di Indonesia dalam ruang politik belakangan ini banyak diminati oleh para peneliti. Analisisnya dibangun dari berbagai macam pendekatan. Misalnya, permasalahan mengenai keterlibatan perempuan dalam ruang politik telah diulas dalam pendekatan studi Islam (fikih),⁵⁶

⁵⁶ Sekadar contoh karya Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan dalam Islam*, terj. Kurniasih (Bandung: Mizan, 2017); Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ed. ke-2 (Yogyakarta: IRCliSod, 2019).

sosipolitik, ekonomi, budaya, dan hukum.⁵⁷ Permasalahan mengenai kemunculan etnis Tionghoa dalam ruang politik juga tidak kalah menarik karena telah diulas dalam pendekatan studi Islam, sosipolitik,⁵⁸ hukum, budaya, dan ekonomi,⁵⁹ serta pertahanan-keamanan.⁶⁰ Penelitian tersebut telah menghendaki adanya permasalahan yang sangat berakar mengenai keterlibatan perempuan dan etnis Tionghoa di dalam ruang politik di Indonesia, meskipun di dalam UUD tahun 1945 meniscayakan persamaan kedudukan baik secara hukum maupun pemerintahan. Hanya saja, perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengulas secara khusus dalam satu topik pembahasan mengenai perempuan dan etnis Tionghoa di dalam ruang politik di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini mengambil posisi

⁵⁷ Sekedar contoh karya Kurniawati Hastuti Dewi, “Profiles, Statutes and Performance of Female Local Leaders: Impact Study of Direct Local Elections,” *Indonesian Feminist Journal* 3, no. 1 (2015): 39–59; Kurniawati Hastuti Dewi et al., *Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal*, ed. Kurniawati Hastuti Dewi (Jakarta: LIPI Pers, 2017); Kurniawati Hastuti Dewi, *Modal, Strategi, dan Jaringan: Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung*, ed. Kurniawati Hastuti Dewi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018); Kurniawati Hastuti Dewi, Nyimas Latifah Letty Aziz, dan Sandy Nur Ikfal Raharjo, *Perempuan Kepala Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender di Indonesia* (Jakarta: LIPI Pers, 2020); Kurniawati Hastuti Dewi et al., *Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks*, ed. Kurniawati Hastuti Dewi (Singapore, Jakarta: National Research and Innovation Agency (BRIN) and Springer, 2022).

⁵⁸ Ahyar dan Alfitri, “Aksi Bela Islam.”

⁵⁹ Sekedar contoh karya Choirul Mahfud, *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Beberapa peneliti lain juga membahasnya dalam pendekatan studi Islam dan sosio-politik, Elia Tambunan, “Islamisme, Kapitalisasi Ruang Kota, dan Gerakan Politik Masyarakat Urban: Aliansi Ekonomi-Politik PKS, Kristen dan Tionghoa” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018); Hew Wai Weng, *Berislam Ala Tionghoa: Pergulatan Etnisitas dan Religiositas di Indonesia* (Bandung: Mizan Pustaka, 2019); Daniel Peterson, *Islam, Blasphemy, and Human Rights in Indonesia* (London, New York: Routledge, 2020); Lidya Christian Sinaga dan Septi Satriani, “Politics of Identity and Anti-Chinese Sentiments in Indonesia,” *Indonesia Journal of Political Research* 2, no. 1 (2021): 17–28.

⁶⁰ Sekedar contoh, Nanto Sriyanto, *Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara* (Jakarta: LIPI Pers, 2013).

penting dalam kajian politik rekognisi untuk lebih diulas secara mendalam dengan pendekatan studi kasus intrinsik dan sosiolegal.

Politik rekognisi menjadi term utama dalam penelitian ini. Penelitian politik rekognisi masih sangat minim sekali dibahas sebagai topik utama oleh para peneliti di Indonesia, tetapi kajian politik rekognisi telah muncul dalam wujud lain. Misalnya, penelitian Zainal Abidin Bagir dan AA GN Ari Dwipayana mengistilahkannya ke dalam pembahasan politik kewargaan mengenai persoalan keragaman, kesetaraan, dan keadilan di Indonesia.⁶¹ Penelitian Eric Hiariej dan Kristian Stokke menjadikannya sebagai salah satu jenis politik kewarganegaraan sebagai bagian perjuangan politik budaya di Indonesia.⁶² Di sisi lain, penelitian Samsul Maarif hanya sekadar menyebut term rekognisi ke dalam permasalahan politik agama di Indonesia.⁶³ Karena itu, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kajian politik rekognisi di sini diulas pada lingkup yang berhubungan dengan perempuan dan etnik Tionghoa dalam ruang politik di Indonesia, kemudian dalam konteks yang lebih khusus dan mendalam menyentuh persoalan keterlibatan perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi kepala daerah di Kota Singkawang 2017–2022 sebagai term spesifik dalam penelitian ini.

Daniel Peterson menyebut bahwa Ahok dipersoalkan karena sebagai “*double minority*” di Indonesia, yaitu Tionghoa dan nonmuslim dalam konteks politik nasional.⁶⁴ Pada konteks yang senada, saya menyebut Tjhai Chui Mie sebagai “*triple minority*” di Indonesia,⁶⁵ yaitu perempuan, Tionghoa, dan nonmuslim (Buddha).

⁶¹ Zainal Abidin Bagir dan AA GN Ari Dwipayana, “Keragaman, Kesetaraan dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan dalam Masyarakat Demokratis,” dalam *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, ed. Zainal Abidin Bagir et al. (Bandung: Mizan dan CRCS, 2011), 38–63.

⁶² Hiariej dan Stokke, “Introduction,” 5–6, 24–53.

⁶³ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama*.

⁶⁴ Peterson, *Islam, Blasphemy*, 1.

⁶⁵ Penduduk laki-laki lebih banyak terlihat sejak sensus pada tahun 1961. Jadi, ada 101 laki-laki setiap 100 perempuan, pada hasil olah cepat SP2010—total penduduk berdasarkan jenis kelamin sekitar 237.556.363, jumlah penduduk perempuan sekitar 118.048.783. Tim SP2010, *Penduduk Indonesia Menurut*

Keterpilihannya sebagai kepala daerah adalah yang pertama di Indonesia di tengah-tengah mayoritas muslim.⁶⁶ Penelitian yang berhubungan dengan keterpilihannya menjadi kepala daerah di Kota Singkawang telah dibahas dengan metode penelitian feminis dari sisi pengalaman politik, etnisitas, dan gender.⁶⁷ Fokus utama penelitian lainnya adalah mengulas modal politik,⁶⁸ strategi politik *ethno-religious*,⁶⁹ dan potensi kontestasi antarkelompok etnis di Kota Singkawang.⁷⁰

Pada konteks Kalimantan Barat, penelitian M. D. La Ode membahas kebangkitan etnis Tionghoa dalam ruang politik, baik di Pontianak maupun Singkawang.⁷¹ Argumentasinya mengenai etnik Tionghoa di Kalimantan Barat adalah bahwa,

“Kondisi Penguasaan politik dan ekonomi dari kelompok ECI di Kota Pontianak dan Kota Singkawang merupakan indikator

Provinsi dan Kabupaten/Kota: Sensus Penduduk 2010 (Jakarta: BPS, Badan Pusat Statistik, 2010), 6, 10–11. Menurut sensus tahun 2010, etnis Tionghoa di Indonesia sekitar 1,2% (2.832.510) dan penganut agama Buddha sekitar 0,72% (1.703.254) dari total populasi 237.641.326 (9-11). Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011), 9–11.

⁶⁶ Minoritas berhubungan dengan kuantitas atau kualitas. Jika berhubungan dengan kuantitas, minoritas adalah sejumlah kecil dari mayoritas. Namun, jika berhubungan dengan kualitas, minoritas berkaitan dengan pengungkapan ideologi dan politik. Hal ini diartikan juga dengan adanya hambatan dan penolakan terhadapnya. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, “Religious Freedom for Minority Muslim Group Based on Gender in Indonesia,” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 2 (2017): 170.

⁶⁷ Dewi, “Chinese Indonesian Women.”

⁶⁸ Ika Kartika, Mudiwati Rahmatunnisa, dan Neneng Yani Yuningsih, “Modal Politik Tjhai Chui Mie dalam Pemilihan Walikota Singkawang 2017,” *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 2 (2018): 139–149; Ika Kartika, “Modal Kandidat Perempuan dalam Pilkada Tahun 2017 (Studi Kasus: Tjhai Chui Mie sebagai Walikota Terpilih di Kota Singkawang),” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 15, no. 1 (2019): 91–114.

⁶⁹ Hui Yew-Foong, “Decentralization and Chinese Indonesian Politics: The Case of Singkawang, West Kalimantan,” *ISEAS Perspective*, no. 19 (2017): 1–10.

⁷⁰ Wasis Suprpto dan Dodik Kariadi, “Kontestasi Etnis di Kancuh Politik,” *Jurnal Sosial Humaniora* 8, no. 2 (2017): 119–125.

⁷¹ Ode, *Etnis Cina Indonesia*, 395.

“matinya nasionalisme” disana. Nasionalisme itu diperlukan justru untuk menghadapi kekuatan politik dari bangsa lain yang berasal dari luar negeri. Kelompok ECI seluruhnya berasal dari bangsa lain dari luar negeri, yaitu RRC”.⁷²

Penelitian La Ode lebih menunjukkan bahwa ECI yang ia maksud lebih berperan sebagai antagonis dan sebaliknya, etnis Melayu dan Dayak berperan sebagai protagonis. Saya kira penyajian analisisnya cenderung tendensius dalam memandang etnis Tionghoa. Di luar itu, Taufiq Tanasaldy membahas peran politik etnis Tionghoa mulai dari faktor munculnya aktivisme dan keberhasilan politik Tionghoa, kemudian memengaruhi politik lokal dari regional di Kalimantan Barat tidak serta-merta muncul di ruang yang kosong. Hal ini terjadi karena ada perjalanan politik Tionghoa pada masa lalu sehingga menyebabkan strategi politik Tionghoa lebih mengedepankan perdamaian dan kerja sama antarkelompok etnis.⁷³

Penelitian yang mengulas keterlibatan perempuan dan etnis Tionghoa dalam ruang politik di Indonesia serta politik rekognisi dalam berbagai aspeknya sangat membantu penelitian ini untuk mengembangkan lebih jauh lagi ke dalam kajian ilmu hukum dan pranata sosial Islam. Untuk penelitian mengenai keterlibatan perempuan menjadi kepala daerah, masih terbatas pada studi politik. Artinya, penelitian tersebut lebih cenderung melihat metode dan prosedur dalam memilih kepala daerah,⁷⁴ kecuali pada episode tertentu, misalnya studi yang diulas oleh Kurniawati Hastuti Dewi mengenai munculnya Tjhai Chui Mie sebagai kepala daerah di Kota Singkawang sebagai bagian dari keragaman pengalaman dan peran perempuan Indonesia dalam memengaruhi politik lokal dan regional di Kalimantan Barat, pasca-Reformasi, sekaligus menawarkan perspektif politik non-androsentris.

⁷² La Ode menyebut etnis Tionghoa di Indonesia sebagai etnis Cina Indonesia (ECI). *Ibid.*, 362.

⁷³ Taufiq Tanasaldy, “A Decade after the Reform: Political Activism of the Chinese of West Kalimantan, Indonesia,” *Asian Ethnicity* 16, no. 4 (2015): 446–479.

⁷⁴ Hiariej dan Stokke, “Introduction,” 2.

Beberapa informasi dari penelitian di atas sangat membantu penelitian ini lebih jauh lagi dalam melihat aspek realitas sosial-kultural dan ekonomi-politik yang terjadi, khususnya di Kota Singkawang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengungkap persoalan keterwakilan perempuan, etnis Tionghoa, dan nonmuslim di dalam ruang politik di Indonesia yang mengalami hambatan dan penolakan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga membahas hubungan masyarakat Singkawang sebagai bagian dari masyarakat *tidayu* meliputi sosial-keagamaan, sosial-kebudayaan, sosial-politik, dan sosio-legal yang telah terjalin sejak lama.

E. Kerangka Teoretis

Indonesia merupakan salah satu negara dengan ciri keragaman, baik itu dari keragaman bahasa, etnis, agama, budaya, maupun lainnya. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi bangsa Indonesia, meskipun tidak dapat menafikan persoalan konflik horizontal yang selalu menjadi “primadona” dalam setiap lembar sejarah bangsa dan negara. Hal tersebut mengizinkan kajian politik rekognisi untuk lebih mengulas persoalan realitas sosial-kultural, ekonomi-politik, dan legal-formal dalam ruang politik di Indonesia.

1. Politik Rekognisi: Sosio-Kultural, Ekonomi-Politik, dan Legal-Formal

Menurut Nancy Fraser, perjuangan atas rekognisi dapat membantu redistribusi kekuasaan dan kekayaan serta dapat mendorong interaksi dan kerja sama dengan melintasi perbedaan.⁷⁵ Menurut Charles Taylor, politik rekognisi hadir karena “misrekognisi”, yaitu kurangnya penghormatan, bahkan menimbulkan “rasa sakit hati” karena sikap kebencian. Jadi, untuk diakui tidak hanya semata-mata diperjuangkan sebagai balas-budi, tetapi sebagai kebutuhan yang vital.⁷⁶ Politik rekognisi bergantung pada pengakuan

⁷⁵ Nancy Fraser, “Rethinking Recognition,” *New Left Review*, no. 3 (May–June 2000): 109.

⁷⁶ Taylor, “The Politics of Recognition,” 26.

yang datang dari individu lain secara intersubjektif. Dari sinilah sikap kekebalan dan integritas individu menjadi tolok ukur.⁷⁷

Penjelasan Charles Taylor dan Axel Honneth tentang rekognisi dipandang sebagai realisasi diri secara etik (*ethical terms*) sehingga hal ini dianggap sebagai masalah kebaikan (*the good*) yang berada di wilayah etika (*ethics*).⁷⁸ Penjelasan Nancy Fraser tentang rekognisi dipandang sebagai masalah keadilan (*justice*) yang berada di wilayah moralitas.⁷⁹ Lebih jauh lagi, masalah keadilan ini menganalisis sebuah hubungan subordinasi yang dilembagakan dan ketidakadilan yang didasari pada pola-pola yang dilembagakan oleh institusi sosial-kultural dengan mencegah individu tertentu untuk berpartisipasi. Interaksinya diatur oleh pola nilai budaya yang dilembagakan dengan membentuk beberapa kategori sosial sesuai norma, sedangkan di luar itu dianggap kurang atau lebih rendah (*inferior*). Dampak dari pola tersebut dapat menciptakan kelas-kelas sosial yang tidak diakui dan dihambat untuk ikut berpartisipasi secara setara dengan yang lain dalam kehidupan sosial.⁸⁰

Politik rekognisi dalam cara pandang Charles Taylor salah satunya adalah demokrasi, yaitu sarana untuk mengantarkan pengakuan yang sama karena sistem demokrasi menuntut untuk status budaya dan gender yang setara.⁸¹ Untuk itu, perlu realisasi diri sesuai dengan batas etika masyarakat agar perjuangan dalam menuju kesetaraan dapat diterima dan diakui secara intersubjektif. Sebaliknya, Nancy Fraser menganggap bahwa kondisi dan karakteristik utama mengenai ketidakadilan, seperti ketidakadilan gender, justru karena budaya androsentrisme. Pola nilai budaya tersebut lebih mengistimewakan maskulinitas, sedangkan sifat yang dianggap feminin justru terdevaluasi.⁸² Hal tersebut menggambarkan bahwa politik rekognisi digunakan untuk membantu menganalisis peranan

⁷⁷ Honneth, "Integrity and Disrespect," 188–189.

⁷⁸ Fraser, "Social Justice," 27–28.

⁷⁹ *Ibid.*, 27.

⁸⁰ *Ibid.*, 29–30.

⁸¹ Taylor, "The Politics of Recognition," 27.

⁸² Fraser, "Social Justice," 20–21.

multikulturalisme di Indonesia, misalnya mengenai representasi perempuan dan etnik Tionghoa (nonmuslim) dalam ruang politik di Indonesia. Sejurus dengan pandangan Nancy Fraser, norma paritas partisipatif berfungsi untuk mengevaluasi formula mengenai kewajiban etis (deontologis) tanpa penilaian etis dari pemahaman budaya atau agama yang bersangkutan.⁸³

Pada konteks politik di Indonesia, misalnya menurut Bahtiar Effendy, masa Orde Baru tidak mengakui Islam politik sebagai bagian dari kebutuhan aspirasi umat muslim di Indonesia⁸⁴ sehingga dilakukanlah beberapa cara yang cukup represif, intimidatif, dan koersif. Hal tersebut mengakibatkan kekuasaan Orde Baru cenderung diskriminatif dan berkurangnya kebebasan individu maupun publik⁸⁵ sehingga cenderung mengingkari pluralitas etnis-budaya dan ideologi-politik masyarakat. Setelah masa Orde Baru runtuh pada bulan Mei tahun 1998, suara-suara dan tindakan disintegratif atau konflik di beberapa daerah muncul dalam konteks etnis, agama, dan ideologi politik. Artinya, yang menjadi catatan penting ialah persoalan integrasi nasional masih harus diperhitungkan.⁸⁶

Apa yang dimaksud Charles Taylor—bahwa politik rekognisi adalah kebutuhan vital manusia—dan Axel Honneth—bahwa keberadaannya bergantung pada pengakuan orang lain—mempunyai relevansi dengan pandangan Bahtiar Effendy mengenai integrasi nasional. Politik rekognisi juga dipahami sebagai pola substansialistik,⁸⁷ yaitu perjuangan dalam 1) pengembangan tatanan politik yang egalitarian dan demokratis serta 2) pengembangan proses-

⁸³ *Ibid.*, 42.

⁸⁴ Perjuangan politik Islam pada masa Orba lebih menekankan negara Islam secara legal-formal karena muslim adalah penduduk mayoritas di Indonesia sehingga tidak sedikit penolakan atas “Asas Tunggal Pancasila”. Lubis, “Religious Nation State,” 179–180.

⁸⁵ Bahtiar Effendy, “Integrasi Nasional di antara Sistem Demokrasi dan Otoriter di Indonesia,” dalam *Islam, Nasionalisme, dan Masa Depan Negara Bangsa Indonesia*, ed. Pandangan Para Ahli dan Aktivis Islam (Jakarta: PPP MPR RI, 2009), 290–291.

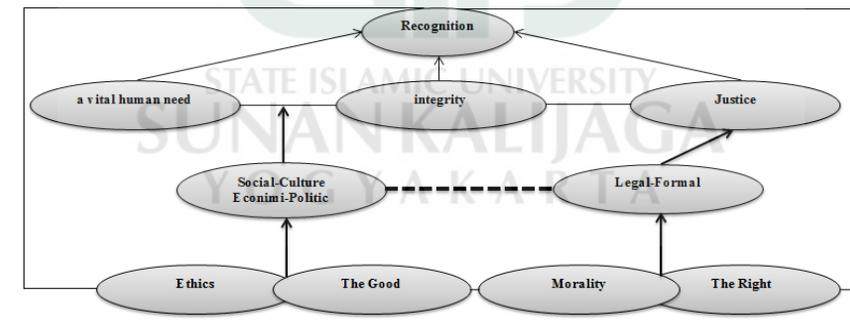
⁸⁶ *Ibid.*, 296–297.

⁸⁷ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 57.

proses ke arah pemerataan ekonomi.⁸⁸ Upaya tersebut telah menjadi wacana politik rekognisi ke dalam beberapa perjuangan, yaitu persoalan demokratisasi, toleransi terhadap agama dan politik, kesetaraan sosial-ekonomi dan emansipasi politik.⁸⁹ Apa yang dimaksud Nancy Fraser bahwa rekognisi berkaitan dengan masalah hak (*the right*) yang harus diperjuangkan secara legal-formal atau bahasa lainnya adalah politik hukum.⁹⁰ Dari sini dapat dilihat bahwa politik hukum membantu pengamatan mengenai perkembangan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai topik penelitian ini dalam membahas keterwakilan perempuan dan etnis Tionghoa (nonmuslim) dalam ruang politik di Indonesia.

Penjelasan di atas dipahami bahwa Charles Taylor dan Axel Honneth melihat politik rekognisi sebagai kebutuhan vital manusia dan integritas individu. Di sisi lain, Nancy Fraser memandang rekognisi berkaitan dengan keadilan secara legal-formal, misalnya dalam politik hukum bahwa tolok ukurnya adalah konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia tanpa harus melihat realitas atau penilaian etis atas sosial-kultural (budaya dan agama). Jadi, dari ulasan tersebut, dapat dibingkai menjadi tabel berikut.

Gambar 1.1 *Theoretical Framework* Politik Rekognisi



⁸⁸ *Ibid.*, 196.

⁸⁹ Bahtiar Effendy, "Islam and the State: The Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia" (Ohio State University, 1994), 239.

⁹⁰ Politik hukum adalah upaya, cara, dan pilihan penyelenggara negara untuk menentukan suatu kebijakan secara resmi demi sesuatu yang dicita-citakan. Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah: Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 24.

Kerangka teoretis politik rekognisi tersebut digunakan dalam membahas perjuangan mengenai keterwakilan pemimpin dan etnis Tionghoa (nonmuslim) di Indonesia dalam ruang politik di tengah penduduk mayoritas muslim. Secara spesifik juga digunakan untuk memotret kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang. Artinya, pembahasan ini tidak terlepas dari realitas sosial, ekonomi, dan representasi politik.⁹¹ Politik rekognisi yang dimaksud adalah mengulas secara lebih mendalam, baik dari aspek sosial-kultural, ekonomi-politik, maupun legal-formal.

Politik rekognisi digambarkan menjadi dua lapisan, yaitu 1) lapisan masyarakat, yang melihat pada persoalan penghormatan, juga pengakuan perbedaan dan keragaman; 2) lapisan politik formal yang dimaknai dengan peran politik dan legal-formal (secara nasional dan lokal), seperti melihat bagaimana keberadaan perundang-undangan, kebijakan negara/pemerintah, dan lainnya di Indonesia dan aras lokal mengenai persoalan pengakuan berbagai perbedaan keberagaman masyarakat.⁹²

2. Perjuangan Politik Rekognisi dalam Ruang Politik

Puncak dari teori rekognisi adalah paritas partisipatif. Penelitian ini juga memerlukan pemetaan aliran pemikiran hukum Islam untuk menganalisis realitas mengenai masalah keterwakilan perempuan dan etnis Tionghoa di tengah mayoritas muslim. Aliran pemikiran hukum Islam yang dimaksud adalah persoalan islamisme. Secara umum islamisme adalah ideologi yang bukan mencirikan representasi Islam, tetapi Islam dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang nonreligius atau singkatnya bahwa islamisme bukan Islam dan juga bukan berbasis di luar Islam.⁹³ Islamisme menurut Noorhaidi Hasan mempunyai persoalan mengenai interpretasi dan dapat mengancam negara demokrasi dengan memengaruhi prinsip negara hukum dan aturan hukum, kedaulatan rakyat, dan persatuan dan pluralitas

⁹¹ Lewis, "Politics of Recognition," 258.

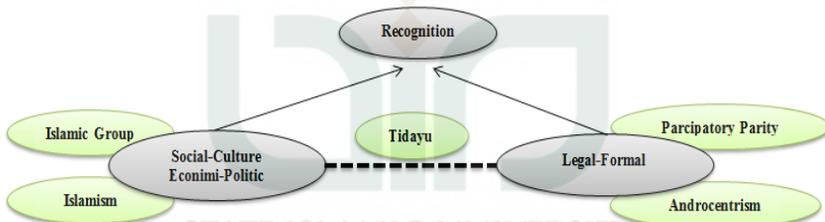
⁹² Bagir dan Dwipayana, "Keragaman, Kesetaraan dan Keadilan," 42.

⁹³ Bassam Tibi, *Islamism and Islam* (New Haven, London: Yale University Press, 2012), 7.

masyarakat Indonesia.⁹⁴ Islamisme adalah proyek keagamaan dan politik dengan bertujuan untuk menghidupkan kembali (*reviving*) dimensi sosial dan politik sebagai pengalaman nominatif, bukan substantif.⁹⁵ Proyeknya adalah menjadikan hukum Islam (*fikih klasik*) sebagai dasar legitimasi atau alat dalam memengaruhi umat muslim sehingga dampaknya keterwakilan perempuan dalam ruang politik dan partisipasinya selalu dihambat dengan mengatasnamakan hukum Islam,⁹⁶ begitu dengan keterwakilan etnis Tionghoa.

Terlepas dari itu, di luar dari kelompok islamisme juga terdapat kelompok yang memperjuangkan kesetaraan gender, mendukung keterlibatan perempuan dan etnis Tionghoa dalam ruang politik. Kelompok ini secara pemikiran lebih bersifat substantif.⁹⁷ Saya menyebutnya sebagai “kelompok islami”.⁹⁸ Perjuangan perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi kepala daerah di Kota Singkawang dapat tergambar sebagai berikut.

Gambar 1.2 Perjuangan Politik Rekognisi dalam Ruang Politik



Teori penawaran dan permintaan (*supply-demand*) dalam proses partisipasi perempuan dalam politik juga diperlukan. Hal ini dapat membantu menjelaskan dan memahami bagaimana bentuk perjuangan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang.

⁹⁴ Noorhaidi Hasan, “Post-Islamism in Indonesia,” dalam *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*, ed. Asef Bayat (New York, USA: Oxford University Press, 2013), 168.

⁹⁵ Andrea Mura, *The Symbolic Scenarios of Islamism: A Study in Islamic Thought* (Enland, USA: Ashgate, 2016), 13.

⁹⁶ Anwar, *Jati-Diri Perempuan dalam Islam*, 63.

⁹⁷ Effendy, “Islam and the State,” 236.

⁹⁸ Lubis, “Contestation on Political Space.”

Untuk itu, apakah dari sisi persediaan atau penawaran, misalnya, perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang adalah satu-satunya calon dalam internal partainya? Di sisi lain, apakah tuntutan atau permintaan partai politik adalah bagian dari harapan masyarakat di Kota Singkawang? Perlu diketahui bahwa penawaran atau persediaan (*supply-side*) biasanya melihat dari modal sumber daya yang dimiliki (seperti waktu, uang, dan pengalaman) dan motivasi (dorongan, ambisi, dan minat). Sebaliknya, tuntutan atau permintaan (*demand-side*) biasanya lebih kepada penyeleksi (*selectors*) memilih kandidat yang bergantung pada penilaian, seperti karakter individu (*personal character*), kualifikasi secara formal, dan pengalaman politik.⁹⁹ Kemudian, akan berpengaruh pada situasi dan kondisi yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Singkawang sehingga dalam perjuangan untuk diakui sebagai kepala daerah diperlukan modal, strategi, dan jaringan dengan elite.¹⁰⁰

3. Implementasi Politik Rekognisi dalam Hukum Tata Negara di Indonesia

Implikasi mengenai politik rekognisi, misalnya dalam konteks fikih *siyasah*, lebih mengedepankan universalitas. Sekadar contoh, dalam prinsip Islam menurut Masdar F. Mas'udi, fikih adalah hasil ijtihad atau proses intelektual untuk menurunkan ketentuan universal pada ketentuan-ketentuan yang bersifat partikular atau spesifik sekaligus kerangka teknis dan operasionalnya.

Term *siyasah* dimaknai sebagai pemerintahan dan politik¹⁰¹ sehingga fikih *siyasah* disebut sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji *nas* bersifat umum dan

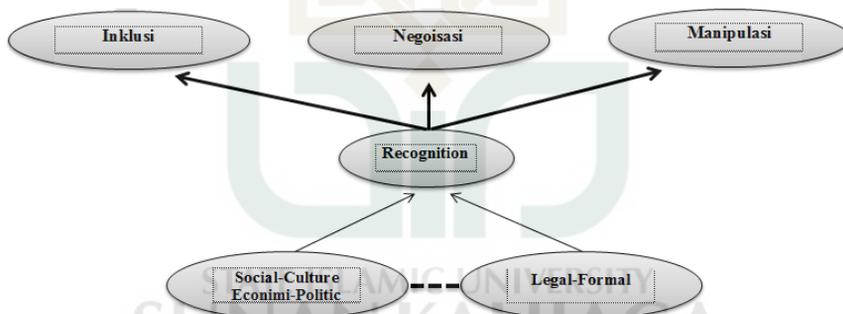
⁹⁹ Pippa Norris dan Joni Lovenduski, *Political Recruitment: Gender, Race and in the British Parliament* (New York: Cambridge University Press, 1995), 106–108.

¹⁰⁰ Kata elite menggambarkan komoditas unggulan tertentu yang mana penggunaannya kemudian menjadi luas seperti merujuk pada kelompok sosial tertentu yang dianggap superior. Tom Bottomore, *Elites and Society*, ed. ke-2 (London, New York: Routledge, 1993), 1.

¹⁰¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 23.

tujuan dalam syariat (*maqashid syari'ah*).¹⁰² Pada konteks fikih *siyashah*, yang dimaksud dengan menurunkan ketentuan yang bersifat *kully* (universal) pada ketentuan yang bersifat *juz'iy* (partikular/spesifik) ialah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setidaknya terdapat prinsip yang bersifat universal, misalnya menurut Munawir Sjadzali dan Masdar Mas'udi, yaitu 1) kedudukan manusia di muka bumi; 2) prinsip musyawarah; 3) ketaatan pada pemimpin; 4) keadilan; 5) kesetaraan sebagai manusia; 6) kesamaan kedudukan di mata hukum; 7) hubungan baik antarumat beragama; 8) kebebasan dan pertanggungjawaban individu; 9) tidak merugikan diri sendiri dan orang lain; 10) kritik dan kontrol sosial; 11) menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan; 12) tolong-menolong untuk kebaikan; dan 13) yang kuat melindungi yang lemah.¹⁰³

Gambar 1.3 Implikasi Politik Rekognisi



Penjelasan di atas dapat digunakan dalam penelitian ini dalam menganalisis implikasi politik rekognisi dalam hukum tata negara di Indonesia, begitu juga dengan resipikal rekognisi di dalam

¹⁰² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 20.

¹⁰³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 5–7; Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, II. (Bandung: Mizan, 1997), 29–30.

masyarakat Kota Singkawang atas keterwakilan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa topik yang berhubungan, wawancara mendalam juga diperlukan, dan observasi.¹⁰⁴ Penelitian ini menggunakan bingkai teoretis dan kerja lapangan¹⁰⁵ sehingga membantu mengulas permasalahan yang menjadi objek kajian dengan beberapa tahapan dan proses. Menurut Ian Dey, yaitu dengan menggambarkan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan beberapa aspek penting yang berhubungan dengan penelitian untuk menghasilkan keseluruhan penjelasan.¹⁰⁶ Penelitian ini dalam prosesnya mengulas permasalahan keterwakilan perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi kepala daerah di Kota Singkawang periode 2017–2022 sebagai bagian dari term utama mengenai politik rekognisi di Indonesia. Term utama tersebut berkaitan dengan keterwakilan perempuan dan etnis Tionghoa dalam ruang politik sehingga analisisnya dimulai dari membahas fenomena perjuangan perempuan dan etnis Tionghoa dalam ruang politik di Indonesia, sosio-demografi masyarakat Singkawang, keterlibatan perempuan Tionghoa nonmuslim dalam ruang politik di Singkawang, dan resiprokal rekognisinya setelah menjadi kepala daerah. Tiap-tiap ulasan dari fenomena tersebut diklasifikasikan sesuai pembahasannya masing-masing dan dihubungkan sesuai objek penelitian.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus intrinsik karena terdapat keunikan dan dapat merepresentasikan kasus lain

¹⁰⁴ Yvonne Darlington dan Dorothy Scott, *Qualitative Research in Practice: Stories from the Field* (Australia: Allen & Unwin, 2002), 2.

¹⁰⁵ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, ed. ke-2 (Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, 2007), 37.

¹⁰⁶ Ian Dey, *Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientist* (London, New York: Routledge, 1992), 32–54.

sehingga sifat dan masalahnya dianggap menarik.¹⁰⁷ Pendekatan sosio-legal diperlukan karena membahas mengenai berfungsinya hukum di masyarakat yang pembahasannya tidak terlepas dari pemahaman antara hukum dan masyarakat.¹⁰⁸ Kedua pendekatan tersebut digunakan dalam kajian politik rekognisi sehingga penelitian ini mengulas secara mendalam mengenai keterwakilan perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang tahun 2017–2022. Selain melihat perjuangannya, juga melihat bekerjanya hukum mengenai kesetaraan, toleransi, dan paritas partisipatif di dalam masyarakat *tidayu* Singkawang ketika dihadapkan pada persoalan keterwakilan perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi kepala daerah.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pertimbangan memilih lokasi ini karena 1) sumber datanya lebih mudah diperoleh; 2) ada yang unik dan menarik, yaitu masyarakat *tidayu* dan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang periode 2017–2022 terpilih di tengah mayoritas penduduk muslim; 3) keterpilihan dan keterwakilannya sejurus dengan polemik Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 oleh beberapa kelompok muslim; 4) di latar belakang juga telah dijelaskan bahwa mayoritas etnis di Kota Singkawang adalah Tionghoa, di sisi lain secara agama adalah muslim; 5) peneliti lebih mudah menjangkau lokasi penelitian selama masa penelitian sehingga dapat bertemu informan secara langsung.

¹⁰⁷ Robert E. Stake, “Qualitative Case Studies,” dalam *The Sage Handbook of Qualitative Research*, ed. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, ed. ke-3 (Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, 2005), 445; Creswell, *Qualitative Inquiry*, 74.

¹⁰⁸ Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya,” dalam *Kajian Sosio-Legal*, ed. Adriaan W. Bedner et al. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 1–11. Lihat juga Adriaan Bedner, “Introducing Socio-Legal Approach to the study of Islamic Law,” *International Webinar*, UIN Raden Intan Mas Said, Surakarta, 2 November 2021.

2. Teknik Pengumpulan

Penelitian ini lebih mengikuti pedoman yang ditawarkan oleh Robert K. Yin dalam melakukan penelitian studi kasus, misalnya menggunakan enam jenis sumber informasi data yang dibutuhkan, yaitu dokumentasi, arsip, observasi langsung, wawancara, observasi partisipan, dan artefak fisik.¹⁰⁹ Penjelasan nya adalah sebagai berikut.

Dokumentasi adalah kajian literatur yang berhubungan dengan topik penelitian ini, seperti aturan perundang-undangan, literatur yang berhubungan dengan nilai sejarah, misalnya berhubungan dengan perempuan dan etnik Tionghoa dalam ruang politik di Indonesia dan Singkawang khususnya sesuai fokus utama dalam penelitian ini. Situs *website* yang diakui kredibilitasnya juga diperlukan dan hasil penelitian lain berupa artikel jurnal ilmiah.

Catatan arsip adalah perundang-undangan, laporan Komisi Pemilihan Umum, dan buku ilmiah yang berhubungan dengan sejarah kebijakan di Indonesia dan Singkawang khususnya. Arsip lainnya berupa manuskrip diperlukan, misalnya catatan dari pemerintah Hindia Belanda, peta dan skema demografi Kota Singkawang, dan lainnya sebagai item yang relevan dalam struktur pemerintahan.

Wawancara dilakukan melalui wawancara secara mendalam atau mengalir. Penggunaan wawancara secara mendalam atau bebas dilakukan di warung kopi, rumah makan, dan tempat-tempat yang bersifat baik untuk menjalin hubungan dengan mengadakan perjanjian temu. Selain itu, penggunaan media aplikasi WhatsApp juga diperlukan untuk wawancara.

¹⁰⁹ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, ed. ke-3 (Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, 2003), 85.

Tabel 1.1 Daftar Informan

No	Wawancara	Jabatan	Waktu
Kepala Daerah dan instansi pemerintahan			
1	Tjhai Chui Mie	Wali Kota Singkawang	Sabtu, 21 November 2020
2	Irwan	Wakil Wali Kota Singkawang	Kamis, 27 Oktober 2022
3	Fahmi	Kepala Bidang di Bappeda Kota Singkawang	Selasa, 2 Februari 2020, pukul 13:00
Kelompok Keagamaan			
1	Muhamma d Abror	Kader NU, Direktur KUB MUI Kota Singkawang, Pendiri FKAPELA Kota Singkawang	Senin, 16 November 2020, pukul 21:30
2	Mufarrohah	Ketua Fatayat NU Kota Singkawang	Rabu, 18 November 2020
3	Zikriadi	Anggota FKUB Kota Singkawang, Pendiri Dakwah Muda Cendikia (DMC) Kota Singkawang, Ketua Bidang Imarah Masjid Agung Nurul Islam Kota Singkawang 2020–2023.	Jumat, 13 November 2020 dan Kamis, 14 Januari 2021
4	Ghazali	Pengurus GP Ansor Kota Singkawang, Sekretaris KNPI Kota Singkawang	Rabu, Februari 2020, pukul 11:45
5	Syahroni	Ketua PMII Kota Singkawang 2014–2016	Media WhatsApp, Senin 25 November 2019
6	Wandi	PKC PMII Kalimantan Barat	Media WhatsApp
7	Nurul	PKC PMII Kalimantan Barat	Media WhatsApp
8	Andika	Ketua PC PMII Kota Singkawang 2017–2018	Kamis, 12 November 2020
Kelompok Kebudayaan			
1	Arnadi Arkan	Ketua MABM Kota Singkawang 2017–2022, Rektor IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas 2022–2027	Selasa, 10 November 2020

2	Stepanus	Ketua DAD Kota Singkawang	Kamis, 19 November 2020
3	Wiliam Simokil	Ketua FKAPELA Kota Singkawang	Rabu, 16 Desember 2020
4	Januaris Ipung Wijanarto	Aktivis Pramuka	Media WhastApp
5	Yulius Yoris Anes	Ketua PAD Kota Singkawang, Sekretaris Partai Demokrat Kota Singkawang	Jumat, 13 November 2020 dan Minggu, 18 April 2021
7	Niken Tia Tantina	Bendahara KNPI Kota Singkawang, Anggota Partai PDI P Kota Singkawang, anggota (PAW) DPRD Kalimantan Barat.	Jumat, 12 Februari 2021
Anggota Tim Akselerasi Pembentukan Kota Singkawang			
	Suganda Gani (almarhum)	Tim Akselerasi Pembentukan Kota Singkawang, pengurus Partai PKB Kota Singkawang, Anggota DPRD Singkawang (2007–2012)	Kamis, 26 November 2020
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)			
	Juli Wahyuni	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Singkawang	Kamis, 27 Oktober 2022

Observasi langsung dilakukan dengan pengamatan beberapa tempat, lokasi, dan momen tertentu yang dianggap memiliki hubungan dengan topik penelitian ini, misalnya peneliti mengunjungi rumah adat MABM, DAD, dan rumah ibadah (masjid, kelenteng, dan gereja) di pusat Kota Singkawang.

Artefak fisik sama seperti penjelasan di atas, seperti tempat ibadah kelenteng, masjid, dan gereja di pusat Kota Singkawang ialah benda bersejarah, begitu juga dengan Tugu Naga, Tugu Cidayu, dan Pasar Hongkong, serta lainnya.

3. Analisis Data

Sejumlah data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis ke dalam tiga tahapan: kondensasi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan, kemudian verifikasi.¹¹⁰ *Pertama*, kondensasi data adalah proses pengumpulan datanya dipilih dan diulas sesuai dengan masalah penelitian, disederhanakan, diabstraksikan, dan/atau ditransformasikan, baik yang ada di dalam transkrip wawancara, catatan lapangan, kajian literatur, maupun bahan empiris lainnya di dalam konteks penelitian ini. *Kedua*, *display* atau paparan data adalah kumpulan informasi yang sudah disusun secara rapi atau diklasifikasi yang nanti dapat ditarik kesimpulan (setiap bab memiliki pengantar dan simpulan). Di luar itu, beberapa data dalam konteks penelitian ini dapat diilustrasikan ke dalam tabel dan gambar. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi berkaitan dengan data yang telah melalui tahap pertama dan kedua tersebut disimpulkan dan diverifikasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini diurut secara sistematis dalam beberapa bab. Pada Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada Bab II berisi penjelasan mengenai sosiodemografi masyarakat Singkawang, yang di dalamnya terdiri dari pengantar, demografi di Kalimantan Barat berdasarkan agama, etnisitas, dan gender, serta sebarannya di Singkawang, kemudian ditelusuri wilayah administrasinya dari masa Hindia Belanda hingga pasca-Reformasi, Singkawang dan masyarakatnya juga diulas pada bagian ini. Penjelasan tersebut ditutup dengan simpulan.

Pada Bab III dijelaskan dinamika perjuangan perempuan dan etnik Tionghoa di tengah masyarakat muslim Indonesia. Ulasannya

¹¹⁰ Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, dan Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publications, 2014), 12–14.

terdiri dari pengantar, penduduk berdasarkan agama, etnisitas, dan gender yang dihadapkan dengan pluralitas, isu perempuan dan etnik Tionghoa di dalam ruang politik, perjuangannya melalui partai politik, rekognisi sebagai perjuangan, dan pada akhir pembahasan diakhiri dengan bagian simpulan. Hal tersebut penting diulas untuk melihat pergeseran paradigma masyarakat muslim di Indonesia dan kebijakan negara yang kaitannya dengan representasi perempuan dan etnik Tionghoa dalam ruang politik.

Pada Bab IV mengulas tentang keterlibatan perempuan Tionghoa nonmuslim pada pilkada Kota Singkawang. Ulasan tersebut sangat penting karena melihat bagaimana representasinya berpengaruh di Singkawang, baik strategi yang dilakukan, isu penolakan, maupun faktor terpilihnya menjadi kepala daerah.

Pada Bab V mengulas relasi budaya dan proses politik menjadi Kepala Daerah Singkawang. Penjelasan bagian ini terdiri dari pengantar, profil kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang, relasi budaya dan proses kandidasi pilkada Kota Singkawang, dan diakhiri simpulan. Pentingnya pembahasan ini untuk mengungkap relasi budaya dan politik yang terjalin atas keterpilihan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Kota Singkawang.

Pada Bab VI menjelaskan resiprokal rekognisi setelah menjadi kepala daerah di Kota Singkawang, yang di dalam terdiri dari pengantar, *living* rekognisi, mengatasi polarisasi, kemanfaatan, inovasi kebijakan, harmoni masyarakat, dan simpulan. Pembahasan pada bab ini sangat penting karena mengulas persoalan implikasi yang berhubungan dengan keterpilihan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim dari relasi budaya dan politik. Ulasan tersebut juga melihat redistribusi melalui kebijakan yang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat agama, etnis, dan budaya. Setelah itu, ditutup dengan bab VII, berisi penutup, yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas sebelumnya, yaitu topik tentang politik rekognisi di Indonesia, terdapat perjuangan panjang bagi perempuan dan etnik Tionghoa untuk mendapatkan pengakuan dalam ruang politik. Diskursus perempuan dan etnik Tionghoa dalam ruang politik di Indonesia yang mengalami dinamika panjang tersebut setidaknya secara historis mengalami peningkatan yang signifikan dari masa kemerdekaan hingga pasca-Reformasi. Dari perjuangan tersebut, belum ada representasi perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi kepala daerah di tengah mayoritas muslim Indonesia. Pada pasca-Reformasi, tepatnya masa pilkada serentak tahun 2017, Tjhai Chui Mie sebagai representasi perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi pelopor kebangkitan perempuan Tionghoa di Indonesia. Terbukanya ruang politik representatif, baik secara konstitusi maupun implementasi, pasca-Reformasi tidak serta-merta berjalan mulus, tetapi perlu adanya perjuangan panjang dan realisasi diri agar mendapatkan pengakuan.

Hasil temuan penelitian Kurniawati Hastuti Dewi menunjukkan bahwa potensi terpilihnya perempuan menjadi kepala daerah adalah karena faktor kekerabatan yang kuat (suami atau orang tuanya adalah politisi berpengaruh) atau kader partai sekaligus mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat. Penelitiannya mengenai konteks pilkada Kota Singkawang tahun 2017, faktor lainnya yang ditemukan adalah adanya keseimbangan etnis. Dalam konteks yang sama, temuan Hui Yew Foong menegaskan bahwa selain afiliasi etnoreligius, juga terdapat faktor elite Tionghoa Singkawang di Jakarta. Temuan penelitian saya melihat bahwa faktor dari potensi keterpilihan tersebut sangat kompleks, meliputi 1) karisma individu; 2) regulasi perundang-undangan yang mempertegas partisipasi seluruh warga negara untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam konteks pilkada; 3) *cross-cutting power*, meliputi persilangan kekuatan antaretnis, persilangan kekuatan

muslim dan nonmuslim, persilangan kekuatan gender, yaitu laki-laki dan perempuan; 4) dukungan partai politik; dan 5) mobilisasi uang dan jaringan.

Relasi yang terjalin secara budaya adalah bahwa Tjhai Chui Mie mempunyai karakter yang cenderung dekat dengan masyarakat, baik dengan kelompok agama maupun kebudayaan. Jadi, dorongan masyarakat Singkawang juga memengaruhi keterpilihannya menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang. Di sisi lain, jalinan relasinya juga tidak terlepas dari dukungan dari pengusaha Tionghoa asal Singkawang. Pengaruhnya tidak hanya sekadar dukungan untuk memilih, tetapi juga mobilisasi uang dan jaringan. Dukungan politik yang kuat juga memengaruhi keterpilihannya, baik dari latar belakang sosial dan politik, internal keluarga, maupun komitmennya terhadap harmonisasi keberagaman agama, etnis, dan budaya. Temuan ini menggambarkan adanya resiprokal rekognisi antara kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim dan masyarakat Kota Singkawang. Lebih jauh lagi, kebijakan pemerintahan yang ia pimpin cenderung mengakomodasi aspirasi masyarakat, misalnya pembangunan Masjid Agung Kota Singkawang yang hanya dilakukan pada masa pemerintahannya. Pada konteks perayaan hari besar umat beragama di Kota Singkawang, tidak hanya ada pelaksanaan “Cap Go Meh”, tetapi juga mengakomodasi perayaan umat muslim yang dikenal dengan “Ramadan Fair” dan perayaan umat kristiani yang dikenal dengan “Christmas Day”.

Penjelasan di atas secara sistematis menunjukkan bahwa disertasi ini telah menemukan 4 (empat) temuan penting berikut.

1. Perjuangan politik rekognisi yang dilakukan perempuan dan etnik Tionghoa di Indonesia dalam ruang politik telah terakomodasi di dalam konstitusi. Hanya saja, dalam praktiknya, partisipasi perempuan dan etnik Tionghoa dalam ruang politik selalu mengalami hambatan, baik di dalam kebijakan maupun penolakan langsung dari masyarakat. Pada pasca-Reformasi, rekognisi tersebut baru mulai terbuka dan hasilnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun dalam praktiknya, faktor dari terpilihnya tersebut

adalah karena kekerabatan yang kuat, sebagai kader partai politik atau keduanya, tidak demikian dengan kemunculan Tjhai Chui Mie sebagai kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim Kota Singkawang tahun 2017–2022. Kemunculan Tjhai Chui Mie adalah gambaran dari rekognisi sebagai perjuangan, sebagai satu-satunya dalam sejarah politik di Indonesia dalam pilkada serentak tahun 2017 menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang di tengah mayoritas penduduk muslim. Atas dasar fakta tersebut, fenomena yang berlangsung telah menunjukkan paritas partisipatif.

2. Bentuk paritas partisipatif inilah yang menyebabkan terpilihnya Tjhai Chui Mie sebagai perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang tahun 2017–2022. Beberapa faktor mengenai potensi keterpilihannya karena 1) karisma individu; 2) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyebutkan segala warga negara berhak untuk berpartisipasi sebagai calon kepala daerah; 3) adanya *cross-cutting power*, baik antaretnis, agama, maupun gender; 4) dukungan dari partai politik; dan 5) pengaruh dari mobilisasi uang dan jaringan. Pengaruh uang dan jejaring ini berasal dari pengusaha Tionghoa asal Singkawang yang mendorong dengan menyiapkan modal untuk maju.
3. Akomodasi regulasi (UU No. 10 Tahun 2016), modal paritas partisipatif, dan jejaring pengusaha Tionghoa asal Singkawang saja tidak cukup. Untuk itu, pada pilkada Kota Singkawang tahun 2017 diperlukan strategi lain agar perempuan Tionghoa nonmuslim mendapatkan pengakuan di tengah mayoritas masyarakat muslim. Strategi tersebut adalah penguatan *cross-cutting power* (silang-menyilang kekuatan) karena mayoritas penduduk Kota Singkawang adalah masyarakat *tidayu* maka silang antaretnis, agama, dan gender menjadi alternatif saat pilkada tahun 2017. Lebih-lebih, hasil dari representasi perempuan Tionghoa nonmuslim menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang diikuti dengan komitmen terhadap harmonisasi keberagaman agama, etnis, dan budaya sehingga mampu

menjadikan Singkawang sebagai “Kota Tertoleran” nomor satu di Indonesia.

4. Realisasi diri juga menjadi perhatian penting karena representasi perempuan Tionghoa nonmuslim secara personal di Kota Singkawang dapat dikatakan mempunyai latar belakang pengalaman yang kuat. Dari sini dapat saya katakan bahwa temuan menarik mengenai konteks ini adalah *living* rekognisi, yaitu bentuk atau pola yang tampak di dalam konstitusi, perundang-undangan, dan masyarakat terkait resiprokal rekognisi karena, *pertama*, secara internalnya memiliki karakter individu yang kuat karena dikenal ramah, bicara terkontrol, cekatan, dan mudah akrab yang menjadikannya berkarisma hingga mendapat dukungan penuh dari suami dan keluarga. *Kedua*, secara sosialnya dengan relasinya kepada masyarakat budaya dan agama terbilang dekat. *Ketiga*, secara politik juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Singkawang tahun 2009–2014 dan tiga kali terpilih sebagai anggota DPRD Kota Singkawang. Ketika terpilih menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang tahun 2017–2022, berbagai inovasi kebijakan dan prestasi telah dilakukan. Hal lainnya, caranya memimpin juga berbanding lurus dengan komitmen yang ada pada salah satu visi-misinya dengan terwujudnya harmoni masyarakat, baik secara agama, etnis, maupun budaya, dan secara faktual telah menjadikan Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran di Indonesia. Atas dasar temuan inilah, perjuangan perempuan Tionghoa nonmuslim dalam ruang politik di Indonesia dapat dikatakan sebagai *living* rekognisi.

B. Saran

Berdasarkan ulasan sebelumnya mengenai politik rekognisi di Indonesia dan perjuangan perempuan Tionghoa nonmuslim yang menjadi Kepala Daerah Kota Singkawang tahun 2017–2022, peneliti berharap memerlukan saran dan kritik kepada peneliti selanjutnya untuk memenuhi kesempurnaan dan menjadi berguna. Terdapat

beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan ke depan sebagai berikut.

1. Penelitian mengenai topik politik rekognisi di Indonesia dalam konteks kajian yang terkonsentrasi pada ilmu hukum dan pranata sosial Islam sama sekali tidak atau belum menjadi perhatian utama para peneliti. Bagi saya, topik tersebut sangat penting untuk dikembangkan lebih jauh lagi dalam kajian ilmu hukum dan pranata sosial Islam karena persoalan ilmu hukum tidak melulu berada dalam ranah kajian positivistik dan yang berhubungan produk hukum, tetapi juga perlu menyentuh persoalan bekerjanya hukum di dalam praktik sosial masyarakat.
2. Kepala daerah di Indonesia sangat perlu memprioritaskan programnya sesuai kepentingan masyarakat agama, budaya, dan gender di dalam kebijakannya. Hal ini diperlukan karena kecenderungan konflik horizontal di Indonesia selalu berdasarkan pada identitas keagamaan, kebudayaan, dan gender tertentu. Program pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, penggunaan anggaran pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai cara untuk meredam terjadinya konflik horizontal.
3. Produk hukum mengenai pilkada di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga pasca-Reformasi mengalami perubahan dan peningkatan yang cukup signifikan. Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan paritas partisipatori di dalam perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan semangat konstitusi. Namun, bagaimanapun juga perlu ditingkatkan lagi, misalnya konteks partisipasi perempuan dalam ruang politik minimal 30% (misalnya, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPRD, DPD, dan DPRD) lebih dimanfaatkan sebaik mungkin untuk perempuan di Indonesia.
4. Keberadaan kepala daerah perempuan Tionghoa nonmuslim di Indonesia hanya terjadi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Pada konteks kajian politik rekognisi, ini menjadi pengetahuan yang sangat baru sebagai bentuk dari *living* rekognisi. Untuk itu, perlu kajian lebih lanjut dalam konteks lain sebagai bentuk pengayaan dalam kajian politik rekognisi dari berbagai perspektif kajian.



DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku

- Abdi, Mohamed Ahmed, Hellen K. Mberia, dan Willy Muturi. “Determinants of Women’s Participation in Politics: A Case Study from Garowe City Puntland-Somalia,” *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)* 3, no. 13 (2016): 166–170.
- ‘Abdissalām, ‘Izzuddīn Ibnu. *Qawā’id Al-Aḥkām fī Maṣāliḥ Al-An’am*. Libanon: Dār al-Jail, 1980.
- Ahmad, Ya’, Amsar Rachman, Soedharto, dan Widodo Adhisidarto. *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*. Ed. Sutrisno Kutoyo dan M. Soenjata Kartadarmadja. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1981.
- Ahyar, Muzayyin, dan Alfitri. “Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 1–29.
- Al-Shaṭībī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Aḥkām*. Juz II. Kairo: Dār al-Fikr li al-Nashr wa al-Tauzī’, n.d.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim. *Kalimantan dan Kalimantan Barat: Potensi, Fenomena, dan Dinamika Sosial Budaya dan Politik dan Tantangan ke Depan*. Pontianak: Yayasan Insan Cita Kalimantan Barat, 2011.
- . *Matahari Akan Terbit di Barat: Kumpulan Karangan Terpilih Sejak 1986-2010*. Pontianak: Yayasan Insan Cita Kalimantan Barat, 2008.
- Amin, Qasim. *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat “Islam Laki-Laki”, Menggugat “Perempuan Baru.”* Yogyakarta: IRCiSod, 2003.

- Anwar, A., dan A. A. Achsien. "Kabaran." *Penoentoen*. Bandoeng, 1938.
- Anwar, Etin. *Jati-Diri Perempuan dalam Islam*. Terj. Kurniasih. Bandung: Mizan, 2017.
- Ardi, Rodolfo D. *Sukarno, Tionghoa, dan Indonesia: Relasi Jejak Sejarah, dan Pembangunan Bangsa*. Surabaya: Ecosystem Publishing, 2018.
- Aripurnami, Sita. "Women's Movements in Indonesia: From Class Struggle to Participation and Representation." Dalam *Indonesian Women's Movement: Making Democracy Gender Responsive*. Jakarta: Women Research Institute, 2013.
- Aspinall, Edward, Sally White, dan Amalinda Savirani. "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 3–27.
- Asshiddiqie, Jimly. "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006): 6–27.
- Atmaja, Dwi Surya, dan Fachrurazi. *Malay and Chinese Indonesian: A Fragile Relation in Northern Coast of West Kalimantan*. Ed. Udi Juliarto. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018.
- Atmaja, Dwi Surya, dan Fachrurazi. *A Potrait of Chinese Diaspora in Cidayu Area (Dinamika Persepsi dan Argumentasi Antar Etnis)*. Ed. Elmansyah. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2019.
- Azhari, Subhi, dan Halili. *Indeks Kota Tertoleran Tahun 2020*. Ed. Ikhsan Yosarie. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2020.
- Bagir, Zainal Abidin, dan AA GN Ari Dwipayana. "Keragaman, Kesetaraan dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan dalam Masyarakat Demokratis." Dalam *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, ed. Zainal Abidin Bagir, AA GN Ari Dwipayana, Mustaghfiroh Rahayu, Trisno Sutanto, dan Farid Wajidi. Bandung: Mizan dan CRCS, 2011.

- Bari, Farzana. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan*. Jakarta: UNDP Indonesia, 2010.
- Bosch, D. W. *Geschied- En Aardrijkskundige: Beschrijving van Neerlands Oost- En West-Indische Bezittingen Door D. W. Bosch*. Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1844.
- Bottomore, Tom. *Elites and Society*. Ed. ke-2. London, New York: Routledge, 1993.
- BPS Kota Singkawang. *Kota Singkawang dalam Angka 2019*. Ed. Syafa'atun. Singkawang: BPS Kota Singkawang, 2019.
- Bunari, Anasrullah Bin, Najah Nadiah Amran, dan Ahmad Asmadi Sakat. "Konsep Kepemimpinan Non-Muslim dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *At-Tahkim* 9, no. 8 (2019): 1–6.
- Chen, Jonathan. "Representing Chinese Indonesians: Pribumi Discourse and Regional Elections in Post-Reform Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 41, no. 1 (2021): 59–87.
- Coppel, Charles A. "Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia." Dalam *The Chinese in Indonesia: Five Essays*, ed. J. A. C. Mackie, 19–76. Australia, London, Canada: Nelson in with The Australian Institute of International Affairs, 1976.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Ed. ke-2 Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, 2007.
- Darlington, Yvonne, dan Dorothy Scott. *Qualitative Research in Practice: Stories From the Field*. Australia: Allen & Unwin, 2002.
- Darwin, Muhadjir. "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 3 (2004): 283–294.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia II*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993.
- Dewanti, Siti Chaerani. “Penyalahgunaan Media Sosial dan Antisipasinya pada Kampanye Pilkada Serentak 2018.” *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* 10, no. 4 (2018): 25–30.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. “Chinese Indonesian Women in Local Politics: The Political Rice Tjhai Chui Mie in Singkawang.” *Asian Women* 35, no. 2 (2019): 53–74.
- . *Modal, Strategi, dan Jaringan: Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung*. Ed. Kurniawati Hastuti Dewi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- . “Profiles, Statutes and Performance of Female Local Leaders: Impact Study of Direct Local Elections.” *Indonesian Feminist Journal* 3, no. 1 (2015): 39–59.
- Dewi, Kurniawati Hastuti, Nyimas Latifah Letty Aziz, dan Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Perempuan Kepala Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender di Indonesia*. Jakarta: LIPI Pers, 2020.
- Dewi, Kurniawati Hastuti, Atika Nur Kusumaningtyas, Fathimah Fildzah Izzati, dan Esty Ekawati. *Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks*. Ed. Kurniawati Hastuti Dewi. Singapore, Jakarta: National Research and Innovation Agency (BRIN) and Springer, 2022.
- Dewi, Kurniawati Hastuti, Atika Nur Kusumanongtyas, Fathimah Fildzah Izzati, dan Esty Ekawati. *Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal*. Ed. Kurniawati Hastuti Dewi. Jakarta: LIPI Pers, 2017.
- Dey, Ian. *Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientist*. London, New York: Routledge, 1992.

- Dzajuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Earl, George Windsor. *The Eastern Seas or Voyages and Adventures in the Indian Archipelago 1832-33-34 Comprising a Tour of the Island of Java-Visits to Borneo, the Malay Peninsula, Siam Etc.; Also an Account of the Present State of Singapore with Observations on the Commercial*. London: Allen and Co., 1837.
- Effendi, Wahyu, dan Prasetyadji. *Tionghoa dalam Cengkraman SKBRI*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Effendy, Bahtiar. “Integrasi Nasional di antara Sistem Demokrasi dan Otoriter di Indonesia.” Dalam *Islam, Nasionalisme, dan Masa Depan Negara Bangsa Indonesia*, ed. Pandangan Para Ahli dan Aktivis Islam, 253–302. Jakarta: PPP MPR RI, 2009.
- . “Islam and the State: The Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia.” Ohio State University, 1994.
- . *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- . *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Emmerson, Donald K. “Inclusive Islamism: The Utility of Diversity.” Dalam *Islamism: Contested Perspectives on Political Islam*, ed. Richard C. Martin dan Abbas Barzegar. Stanford, California: Stanford University Press, 2010.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Ed. Agung Prihantoro. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- . *Islam Masa Kini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Fadli, Yusuf. “Islam, Perempuan, dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi.” *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (2018): 41–63.

- Fealy, Greg. "Bigger than Ahok: Explaining the 2 December Mass Rally." *Indonesia at Melbourne*, 7 Desember 2016. Diakses 31 Mei 2020.
<https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/>.
- Fraser, Nancy. "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 'Post-Socialist' Age." *New Left Review*, no. 212 (1995): 68–149.
- . *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition*. New York, London: Routledge, 1997.
- . "Recognition without Ethics?" *Theory, Culture & Society* 18, no. 2–3 (2001): 21–42.
- . "Rethinking Recognition: Overcoming Displacement and Reification in Cultural Politics." Dalam *Recognition Struggles and Social Movements: Contested Identities, Agency and Power*, ed. Barbara Hobson, 21–32. Cambridge, New York, Port Melbourne, Madrid, Cape Town: Cambridge University Press, 2003.
- . "Rethinking Recognition." *New Left Review*, no. 3 (May–June 2000): 107–120.
- . "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation." Dalam *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, ed. Nancy Fraser dan Axel Honneth. Terj. Joel Golb, James Ingram, dan Christiane Wilke. London, New York: Verso, 2003.
- Fuller, Graham E. *The Future of Political Islam*. New York, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England: Palgrave Macmillan, 2003.
- Hafidz, Masykurudin, Ahsanul Minan, Yohan Wahyu, Toto Sugiarto, Engelbert Johannes Rohi, Yusfitriadi, Sunanto, et al. *Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, 2018.

- Halili. *Indeks Kota Toleran Tahun 2018*. Ed. Ismail Hasani. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2018.
- Hamidu, Ishaku, dan Mustapa Alhaji Ali. “Challenges of Women Participation in Politics of Yobe State, Nigeria.” *Sahel Analyst: Journal of Management Sciences* 2 16, no. 4 (2018): 98–110.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz II*. Jakarta: Panjimas, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar Juz V*. Jakarta: Panjimas, 1983.
- Haryanto. “Rezim Lokal Pontianak: Upaya Kelompok-Kelompok Etnis Memperebutkan Negara.” Dalam *Rezim Lokal di Indonesia*, ed. Longgina Vovadona Bayo, Purwo Santoso, dan Willy Purna Samadhi, 157–180. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan PolGov Fisipol UGM dan University of Oslo, 2018.
- Haryanto, Joko Tri. “Interaksi dan Harmoni Umat Beragama.” *Walisongo* 20, no. 1 (2012): 211–234.
- Hasan, Noorhaidi. “Post-Islamism in Indonesia.” Dalam *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*, ed. Asef Bayat. New York, USA: Oxford University Press, 2013.
- Hiariej, Eric, dan Kristian Stokke. “Pendahuluan: Politik Kewargaan di Indonesia.” Dalam *Politik Kewargaan di Indonesia*, ed. Eric Hiariej dan Kristian Stokke. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Hiariej, Eric, dan Olle Tornquist. “Politik Indonesia dan Kewargaan dalam Perspektif Sejarah.” Dalam *Politik Kewargaan di Indonesia*, ed. Eric Hiariej dan Kristian Stokke. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Hiariej, Eric, dan Kristian Stokke. “Introduction: Politics of Citizenship in Indonesia.” Dalam *The Politics of Citizenship in Indonesia*, ed. Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 1–22. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

- Hidayadi, Taufik, dan Henny Saptatia Drahati Nugrahani. "Streotip Warga Tionghoa dalam Geopolitik Hubungan Indonesia dengan Tiongkok." *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* 1, no. 2 (2020): 133–144.
- Himpunan Risalah Sidang-Sidang. "Dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Tanggal 29 Mei 1945–16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945." Indonesia, n.d.
- Hollander, J. J. De. *Handleiding Bij de Beoefening Der Land-En Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie, Tweede Deel*. Vierde. Breda: Ter Drukkerij van Broese & Comp., voor Rekening van de Koninklijke Militaire Academie, 1884.
- Honneth, Axel. "Integrity and Disrespect: Principles of a Conception of Morality Based on the Theory of Recognition." *Political Theory* 20, no. 2 (1992): 187–201.
- . "Recognition or Redistribution? Changing Perspectives on the Moral Order Society." *Theory* 18, no. 2–3 (2001): 43–55.
- . *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Terj. Joel Anderson. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1995.
- Hooyer, G. B. *De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsch-Indie van 1811 Tot 1894, Deel II*. Den Haag, Batavia: De Gebr. Van Cleef, G. Kolff & Co., 1896.
- Ibrahim, Muhammad, dan Razia Mussarat. "Women Participation in Politics: A Case Study of Afghan Women." *Journal of Public Administration and Governance* 4, no. 3 (2014): 433–447.
- Ilyas, Yunahar. "Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Tinjauan Tafsir Al-Qur'an." *Tarjir* 3, no. 1 (2002): 63–73.
- Irfani, Amalia. "Pola Kerukunan Melayu dan Tionghoa di Kota Singkawang." *Al-Hikmah* 12, no. 1 (2018): 1–16.

- Irianto, Sulistyowati. “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya.” Dalam *Kajian Sosio-Legal*, ed. Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, dan Theresia Dyah Warastri, 1–18. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Izzati, Fathimah Fildzah. “Permasalahan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Masyarakat Etnik Tionghoa di Singkawang.” Dalam *Potret Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Etnik Tionghoa di Singkawang dan Tangerang*, ed. Lidya Christin Sinaga, Asvi Warman Adam, Fathima Fidzah Izzati, Syaufan Rozi Soebhan, Atika Nur Kusumaningtyas, dan Esty Ekawati. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Ja’far. “Al Jam’iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan Non-Muslim dan Perempuan.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 413–424.
- Jamil, M., dan Ja’far. “Pemimpin Perempuan dan Non-Muslim Perspektif Ulama Tiga Serangkai.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2018): 144–167.
- Jr., van J. L. Vleming. *Het Chineesche Zakenleven in Nederlandsch-Indie*. Weltevreden: Landsdrukkerij, 1926.
- Julinar, dan Triana Wulandari. *Ensiklopedi Pahlawan Nasional*. Jakarta: Sub Direktorat Sejarah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jendral Kebudayaan, 1995.
- Kantola, Johanna, dan Emanuela Lombardo. “Populism and Feminist Politics: The Cases of Finland and Spain.” *European Journal of Political Research* 58, no. 4 (2019): 1108–1128.
- Kartika, Ika. “Modal Kandidat Perempuan dalam Pilkada Tahun 2017 (Studi Kasus: Tjhai Chui Mie sebagai Walikota Terpilih di Kota Singkawang.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 15, no. 1 (2019): 91–114.
- Kartika, Ika, Mudiwati Rahmatunnisa, dan Neneng Yani Yuningsih. “Modal Politik Tjhai Chui Mie dalam Pemilihan Walikota Singkawang 2017.” *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 2 (2018): 139–149.

- Kerwanto. “Kepemimpinan Non-Muslim: Konsep Wilayah dalam Al-Qur’an sebagai Basis Hukum Kepemimpinan Non-Muslim.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2017): 373–398.
- Khalik, Abu Tholib. “Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 59–89.
- Khodair, Amany A., dan Bassant Hassib. “Women’s Participation in Egypt: The Role of the National Council for Woman.” *International Journal of Political Science and Development* 3, no. 7 (2015): 326–337.
- Kusuma, Eddie, dan S. Satya Dharma. *Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia sebelum dan Sesudah Reformasi 1998*. II. Jakarta: Sakti Awam, 2006.
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015.
- Lan, Thung Ju. “Contesting the Post-Colonial Legal Construction of Chinese Indonesians as ‘Foreign Subjects.’” *Asian Ethnicity* 13, no. 4 (2012): 373–387.
- Lewis, Lydia. “Politics of Recognition: What Can a Human Rights Perspective Contribute to Understanding Users’ Experiences of Involvement in Mental Health Services?” *Social Policy & Society* 8, no. 2 (2009): 257–274.
- Lovell, Terry. “Introduction.” Dalam *(Mis)Recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu*, ed. Terry Lovell, 1–16. London, New York: Routledge, 2007.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. “Contestation on Political Space between Islamism and Islamic Group in Presidential Election 2019.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2020).

- . “NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasional.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (2020): 222–250.
- . “Religious Nation State: Bahtiar Effendy and Islamic Political Thought.” *Millah: Jurnal Studi Agama* 19, no. 2 (2020): 167–198.
- . “Rethinking the Book of Al-’Aql Al-Siyasi Al-’Arabi and Indonesian Political Phenomenon.” *Jurnal Penelitian* 17, no. 1 (2020): 67–80.
- . *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Ed. revisi. Yogyakarta: CRCS, 2018.
- Mahfud, Choirul. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mangoensarkoro, Nj. Sri. “Petoendjoek Oentoek Pimpinan Batin.” *Madjallah “Wanita Repoeblik Indonesia.”* Mataram, 1946.
- Manuakti, Yeti. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Manus, MPB., Zulfikar Ghazali, Susanto Zuhdi, Sumardi, Wiwi Kuswiah, P. Savyo Haryono, Triana Wulandari, dan Julinar Said. *Tokoh-Tokoh Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Jilid I*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993.

- Marhumah. *Hadis Misoginis: Resepsi, Negosiasi dan Pergolakan Pemikiran antara Tradisi dan Modernitas di Indonesia*. Rapat Senat Terbuka. Yogyakarta, 2019.
- Marpaung, Fenny Pebrina. *Statistik Daerah Kota Singkawang 2018*. Ed. Firmansyah. Singkawang: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2018.
- . *Statistik Daerah Kota Singkawang 2019*. Ed. Firmansyah. Singkawang: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2019.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*. II. Bandung: Mizan, 1997.
- Masitoh, Noneng. "Gerakan dan Representasi Politik Perempuan di Kota Tasikmalaya." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2016): 215–232.
- McLaughlin, Janice, Peter Philimore, dan Diane Richardson. "Introduction: Why Contesting Recognition?" Dalam *Contesting Recognition: Culture, Identity and Citizenship*, ed. Janice McLaughlin, Peter Philimore, dan Diane Richardson. London, England: Palgrave Macmillan, 2011.
- Meij, Lim Sing. *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa: Sebuah Kajian Pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Mernissi, Fatima. *Wanita di dalam Islam*. Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994.
- Milles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Jhonny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed. ke-3. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publications, 2014.
- Mozingo, David. *Chinese Policy toward Indonesia 1949-1967*. Jakarta, Kuala Lumpur: Equinox Publishing, 2004.

- Mubarok, (ed.) *Peta Keagamaan di Indonesia*. II. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Penelitian Agama, 1994.
- Muhajir. “Kepemimpinan dalam Islam.” *Al-Qadha* 5, no. 2 (2019): 9–18.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Ed. ke-2. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- . *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2019.
- Muhtarom, Ali. “Ideologi, Transnasionalisme, dan Jaringan Lembaga Pendidikan Islam: Kontestasi LIPIA dan STFI Sadra di Indonesia.” UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Mura, Andrea. *The Symbolic Scenarios of Islamism: A Study in Islamic Thought*. Enland, USA: Ashgate, 2016.
- Na'im, Akhsan, dan Hendry Syaputra. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011.
- Nafi'ah, Ulfatun, dan Hawiki Renalia. *Keramik Singkawang: Menjaga Tradisi dalam Harmoni*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, 2019.
- Norris, Pippa, dan Joni Lovenduski. *Political Recruitment: Gender, Race and in the British Parliament*. New York: Cambridge University Press, 1995.
- Nugraha, Alfajar. “Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2016): 208–237.

Ode, M. D. La. *Etnis Cina Indonesia dalam Politik: Politik Etnis Cina Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

———. *Trilogi Pribumisme: Resolusi Konflik Pribumi dengan Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia, 2018.

Oesman, A. Madjid. “Mimbar Poetri: Rangkajo Rasoena Said Memimpin Madjllah Poetri di Medan.” *Dagblad*. Padang, 1938.

Ohorella, G. A., Sri Sutjiatiningsih, dan Muchataruddin Ibrahim. *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1992.

Pahlevi, Indra. “Hasil Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2014 dan Penerapan Parliamantary Threshold.” *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta, 2014.

Pahrudin, dan Hapsa. “Praktik Patronase Politik di Indonesia Pasca Reformasi dan Upaya Mengatasinya.” *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 1, no. 6 (2019): 93–106.

Parawansa, Khofifah Indar. “Enhancing Women’s Political Participation in Indonesia.” Dalam *Women in Parliament: Beyond Numbers*, ed. Julie Ballington dan Azza Karam, 82–90. A Revised. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005.

Perdana, Aditya, dan Delia Wildianti. “Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia.” *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan* 24, no. 1 (2019): 43–52.

Peterson, Daniel. *Islam, Blasphemy, and Human Rights in Indonesia*. London, New York: Routledge, 2020.

Prasojo, Zaenuddin Hudi. “Indigenous Community Identity within Muslim Societies in Indonesia: A Study of Katab Kebahan Dayak in West Borneo.” *Journal of Islamic Studies* 22, no. 1 (2011): 50–65.

- . “Moderate Islam and the Social Contraction of Multi-Ethnic Communities in the Hinterland of West Kalimantan.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (2019): 217–239.
- . “Social Change and the Contributions of the Tionghoa, Dayak and Melayu (Tidayu) in West Kalimantan.” Dalam *Borneo Studies in History, Society and Culture*, ed. Victor T. King, Zawawi Ibrahim, dan Noor Hasharina Hassan, 427–442. Singapore: Springer Science+Business Media Singapore, 2017.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*. Jakarta: PN Balai Pustaka dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Purwanto, Hari. *Cina Khek di Singkawang*. Ed. ke-2 Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Qurtuby, Sumanto Al, dan Tedi Kholiludin, (eds.). *Tionghoa dan Budaya Nusantara*. Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama (eLSA) Press, 2021.
- Rafni, Al. “Akses dan Kontrol Politik Perempuan Etnis Cina dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang.” *Demokrasi* 6, no. 2 (2007): 1–16.
- Rahayu, Ruth Indiah. “Militerisme Orde Baru dan Ideologi Koncowingking: Penguatan Ideologi Perempuan Indonesia Secara Pemaknaan Ksatria Jawa.” Dalam *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*, 365–388. Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007).
- Rahmaniah, Syarifah Ema. *Gender dan Politik*. Pontianak: TOP Indonesia, 2018.

Rahmayani, Any. *Pemukiman Tionghoa di Singkawang Abad ke-19 (Sejarah Kota Bercirikan Tionghoa)*. Pontianak: BPSNT Pontianak, 2010.

———. *Pemukiman Tionghoa di Singkawang dari Masa Kongsi hingga Masa Kolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Rahzen, Taufik, Muhidin M Dahlan, Agung Dwi Hartanto, Arahman Topan Ali, Argus Firmansyah, Dian Andika Winda, Iswara N Raditya, et al. *Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007)*. Yogyakarta: I:BOEKOE kerja sama dengan Newseum Indonesia, 2007.

Rini, Anindita Kartika. “Lian Gouw dan Jejak Perempuan Tionghoa di Indonesia.” Dalam *Tionghoa dan Budaya Nusantara*, ed. Sumanto Al Qurtuby dan Tedi Kholiludin, 257–290. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2021.

Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2021. Jakarta, 2021.

Robikah, Siti. “Kepemimpinan Politik Wanita dalam Perspektif Fatima Mernissi.” *El-Hikam* 12, no. 2 (2019): 287–308.

Rozaki, Abdur. *Islam, Oligarki Politik & Perlawanan Sosial*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan Suka Press, 2016.

Schenk, M. G., dan Sundari Munar. *Gerakan Wanita di Dunia*. Djakarta: Djembatan, 1950.

Schuurman, L. N., dan P. H. Jordens. *Wetten En Verordeningen Betreffende Suriname, Curacau En Nederlandsch Indie, Met Aanteekeningen En Alpabetisch Register Op Het Reglement Nopens Het Beleid Der Regering van Nederlandsch Indie*. Tweede Dru. Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink, 1883.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.

- Shvedova, Nadezhda. "Obstacles to Women's Participation in Parliament." Dalam *Women in Parliament: Beyond Numbers*, ed. Julie Balington dan Azza Karam. Ed. Revisi. Sweden: International Institute fo Democracy and Electoral Assitance, 2005.
- Silvita, Mary. "Presiden Non-Muslim dalam Komunitas Masyarakat Muslim." *Jurnal Islamica* 7, no. 1 (2012): 44–60.
- Sinaga, Lidya Christian, dan Septi Satriani. "Politics of Identity and Anti-Chinese Sentiments in Indonesia." *Indonesia Journal of Political Research* 2, no. 1 (2021): 17–28.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Soejatmiko, Basuki, (ed.) *Etnis Tionghoa di Awal Kemerdekaan Indonesia: Sorotan Bok Tok Pers Melayu-Tionghoa Desember 1945-September 1946*. Surabaya: Majalah Mingguan Liberty, 1982.
- Somers, Mary. *Penambang Emas, Petani dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil, 2008.
- Sriyanto, Nanto. *Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*. Jakarta: LIPI Pers, 2013.
- Stake, Robert E. "Qualitative Case Studies." Dalam *The Sage Handbook of Qualitative Research*, ed. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. Ed. ke-3. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, 2005.
- Stokke, Kristian. "Politik Kewargaan: Kerangka Analisis." Dalam *Politik Kewargaan di Indonesia*, ed. Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 23–56. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan PolGov Fisipol UGM dan University of Oslo, Norwegia, 2018.

Subekti, dan Parwoto. *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020 Provinsi Kalimantan Barat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.

Sukarno. *Kewadjaban Wanita dalam Perjoangan Republik Indonesia*. Jakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Sukarno, 1963.

Sunarwoto. "Ulama, Fragmentasi Otoritas, dan Imajinasi Negara-Bangsa: Studi Kasus Pontianak." Dalam *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-Kota Indonesia*, ed. Ibnu Burdah, Najib Kailani, dan Munirul Ikhwan. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019.

Suprpto, Wasis, dan Dodik Kariadi. "Kontestasi Etnis di Kancah Politik." *Jurnal Sosial Humaniora* 8, no. 2 (2017): 119–125.

Suradinata, Ermaya. "Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional* 6, no. 2 (2001): 79–97.

Suratmin, Sri Sutjiatiningsih, G. A. Ohorella, Ernayanti, dan Suhatno. *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991.

Suryadinata, Leo. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Terj. Sori Siregar dan Teti Filantri Siregar. Jakarta: LP3ES, 1999.

———. "Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?" *Antropologi Indonesia* 1, no. 71 (2003): 1–12.

——— (ed.). *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2005.

Suryadinata, Leo, Evi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

- Suryadinata, Muhammad. “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Al-Qur’an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim.” *Ilmu Ushuluddin* 2, no. 3 (2015): 241–253.
- Suryawati, Nany. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Syamsudin, Sahiron. “Ma’na-Cum-Maghza Approach to the Qur’an: Interpretation of Q. 5:51.” *International Conferences on Qur’an and Hadith Studies (ICQHS 2017)*, 131–136. Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 2017.
- Tambunan, Elia. “Islamisme, Kapitalisasi Ruang Kota, dan Gerakan Politik Masyarakat Urban: Aliansi Ekonomi-Politik PKS, Kristen dan Tionghoa.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Tanasaldy, Taufiq. “A Decade after the Reform: Political Activism of the Chinese of West Kalimantan, Indonesia.” *Asian Ethnicity* 16, no. 4 (2015): 446–479.
- Tanggok, M. Ikhsan. *Agama dan Kebudayaan Orang Hakka di Singkawang*. Jakarta: Kompas, 2017.
- Taylor, Charles. “The Politics of Recognition.” Dalam *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, ed. Amy Gutmann. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
- Thamrin, M. H., Bagindo Togar Butar-Butar, Aris Munandar, Oenar Madri Bafadhal, Ferdiansyah Rivai, dan Gunawan Lestari Elake. *Laporan Penelitian Keterwakilan Perempuan*. Palembang: KPU, 2019.
- Tibi, Bassam. *Islam dan Islamisme*. Terj. Alfathri Adin. Bandung: Mizan, 2016.
- . *Islamism and Islam*. New Haven, London: Yale University Press, 2012.

———. *Political Islam, World Politics and Europe: From Jihadist to Institutional*. London, New York: Routledge, 2014.

Tim Penyusun ANRI. *Guide Arsip Pemilihan Umum 1955-1999*. Jakarta: Arsip Nasional RI, 2015.

Tim Penyusun Pusdain. *Buku Informasi Statistik*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDAIN), 2017.

Tim SP2010. *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota: Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS, Badan Pusat Statistik, 2010.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. II. Jakarta: Paramadina, 2001.

Vlekke, Bernard H.M. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Terj. Samsudin Berlian. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Freedom Institute dan Balai Pustaka, 2008.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

Wardaya, Baskara T., A. Muhammad Asrun, Aloysius Gunadi Brata, Asvi Warman Adam, Daddi Heryono Gunawan, Dede Oetomo, Douglas Kammen, et al. *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*. Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2007.

Weng, Hew Wai. *Berislam Ala Tionghoa: Pergulatan Etnisitas dan Religiositas di Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka, 2019.

Widiastuti, Rr. Siti Kurnia. "Religious Freedom for Minority Muslim Group Based on Gender in Indonesia." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 2 (2017): 169–187.

Williams, Robert R. "Aristotle and Hegel on Recognition and Friendship." Dalam *The Plural States of Recognition*, ed.

- Michel Seymour. England, London: Palgrave Macmillan, 2010.
- Yew-Foong, Hui. “Decentralization and Chinese Indonesian Politics: The Case of Singkawang, West Kalimantan.” *ISEAS Perspective*, no. 19 (2017): 1–10.
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. Ed. ke-3. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, 2003.
- Young, Iris Marion. *Justice and the Politic of Difference*. Princenton, New Jersey: Princenton University Press, 1990.
- Yulianti, Rahmani Timorita. “Kepemimpinan Wanita di Indonesia Perspektif Budaya dan Agama.” *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 27, no. 52 (2004): 190–200.
- Yusuf, Imtiyaz. “Managing Religious and Ethnic Diversity for Peace and Harmony: Islam and Buddhism in The Malay World of South East Asia.” *Journal of Malay Islamic Studies* 1, no. 2 (2017): 129–140.
- . “The Southern Thailand Conflict and the Muslim World.” *Journal of Muslim Minority Affairs* 27, no. 2 (2007): 319–339.
- Zaidan, ‘Abdul Karīm. *Al-Wajīz, fī Uṣūl Al-Fiqh*. Oman: Maktabah al-Batsair, 1994.
- Zaken, Departement van Economische. *Volkstelling 1930 Deel V: Inheemsche Bevolking van Borneo, Celebes, de Kleine Soenda Eilanden En de Molukken, Cencus of 1930 in the Netherlands Indies, Volume V: Native Population in Borneo, Celebes, the Lesser Sunda Islands and the Moluccas*. Batavia: Landsdrukkerij, 1936.
- Zarfinayenti. “Partisipasi Perempuan dalam Politik: Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan dalam Politik di Provinsi Jambi Masa Reformasi Sampai Sekarang (Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Zayd, Nasr Hamid Abu. *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*. Ed. Moch. Nur Ichwan and Moch. Syamsul Hadi. Terjemahan. Yogyakarta: SAMHA, 2003.

Perundang-undangan

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 860/PEM/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Tjhai Chui Mie, SE Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 881.4/64/BKD-C tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 48/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017.

Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kota Singkawang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang.

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sumber Elektronik dan Internet

“Aksi Bela Ulama 205 Kisruh, Pontianak Berstatus Siaga.” *Tempo.co*, 20 Mei 2017. Diakses 31 Oktober 2019. <https://nasional.tempo.co/amp/877179/aksi-bela-ulama-205-kisruh-pontianak-berstatus-siaga>.

“Aksi Bela Ulama di Kalbar ‘Tiru’ Politik SARA Pilkada Jakarta.” Diakses 31 Oktober 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39992156>.

“Aksi Bela Ulama Jilid II, Muslim Kalbar Bersatu.” Diakses 31 Oktober 2019. <https://amp.kalbar.prokal.co/read/news/687-aksi-bela-ulama-jilid-ii-muslim-kalbar-bersatu/1>.

“Aliansi Umat Islam Kalbar Tuntut Usut Penghadangan Ulama di Sintang.” *Seruji.com*, 13 Januari 2017. Diakses 31 Oktober 2019. <https://seruji.co.id/daerah/indonesia-timur/aliansi-umat-islam-kalbar-tuntut-usut-penghadangan-ulama-di-sintang/>

“Kalbar dan Papua Paling Rawan Konflik di Pilkada 2018, Polri Akan Kuatkan Pengamanan.” *Kompas.com*, 16 Januari 2018. Diakses 31 Oktober 2019. <https://nasional.kompas.com/red/2018/01/16/06080591/kalbar-dan-papua-paling-rawan-konflik-di-pilkada-2018-polri-akan-kuatkan>.

“Press Release: Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018.” Diakses 15 Desember 2019. [Setara-institute.org/indeks-kota-toleran-ikt-tahun-2018/](http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-ikt-tahun-2018/).

“Ribuan Umat Islam Kalbar Protes Ahok di Mujahidin.” *Teraju.id*, 14 Oktober 2016. Diakses 31 Oktober 2019. <https://teraju.id/berita/ribuan-umat-islam-kalbar-protes-ahok-di-mujahidin-2265/>.

“Tjhai Chui Mie: Banyak ‘Sharing’ mengenai Strategi Politik.”
www.suarapemredkalbar.com. Diakses 30 Januari 2023.
<https://www.suarapemredkalbar.com/read/opini/21022016/tjhai-chui-mie-banya-k-sharing-mengenai-strategi-politik>.

Abraham, Jimmi. “Tjhai Chui Mie-Irwan Dilantik, Ini Isi Keputusan Menteri Dalam Negeri.” *TribunPontianak.co.id*, 17 Desember 2017. Diakses 12 Desember 2018.
<https://pontianak.tribunnews.com/2017/12/17/tjhai-chui-mie-irwan-dilantik-ini-isi-keputusan-menteri-dalam-negeri>.

Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010, Provinsi Kalimantan Barat. “Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut Provinsi Kalimantan Barat.” Diakses pada 14 Desember 2019.
www.sp2010.bps.go.id.

Candraditya, Vincentius Jyestha. “Cerita Perempuan Tionghoa Tjhai Chui Mie Terjun di Politik hingga Terpilih Jadi Wali Kota Singkawang.” *Tribunnews*, 12 Februari 2021. Diakses 30 Januari 2023.
<https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/02/12/cerita-perempuan-tionghoa-tjhai-chui-mie-terjun-di-politik-hingga-terpilih-jadi-wali-kota-singkawang>.

Hidayatullah, Arsito. “Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie: Harmonis dan Toleransi Kunci Kemajuan.” Diakses 30 Januari 2023.
<https://amp.suara.com/wawancara/2021/03/23/074000/wali-kota-singkawang-tjhai-chui-mie-harmonis-dan-toleransi-kunci-kemajuan>.

<https://portal.singkawang.go.id/prestasi-inovasi/>, diakses 23 September 2022.

Irawan, Yohanes Kurnia. “Wihara di Singkawang Dilempar Botol Diduga Bom Molotov.” *Kompas.com*, 14 November 2016. Diakses 14 Desember 2019.
<https://regional.kompas.com/read/2016/11/14/16333331/vihara.di.singkawang.dilempar.botol.diduga.bom.molotov?page=all>.

Iskan, Dahlan. “Chui Mie.” Diakses 23 Januari 2023.
<https://disway.id/read/676853/chui-mie>.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017.

Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967.

Malagina, Agni. “Singkawang: Kami Juga Ingin Hidup Tenang.” 27 November 2010. Diakses 14 Desember 2019.
<https://staff.blog.ui.ac.id/agni.malagina/2010/11/27/singkawang-kami-juga-ingin-hidup-tenang/>.

MC Singkawang. “Raih Kota Toleran Se Indonesia, Singkawang Gelar Syukuran.” *mediacenter.singkawangkota.go.id*, 2 April 2022. Diakses 25 November 2022.
mediacenter.singkawangkota.go.id/raih-kota-toleran-se-indonesia-singkawang-gelar-syukuran/.

MC Singkawang. “Rapat Kerja Awal Tahun, Lanjutkan Program Pembangunan di Tahun 2022.” *mediacenter.singkawangkota.go.id*, 4 Januari 2022. Diakses 24 September 2022.
<https://mediacenter.singkawangkota.go.id/rapat-kerja-awal-tahun-lanjutkan-program-pembangunan-di-2022/>.

MC Singkawang. “Singkawang Ramadan Fair Implementasi Kota Tertoleran.” *Media Center Kota Singkawang*, 3 Mei 2019. Diakses 14 Desember 2019.
<https://mediacenter.singkawang.go.id/singkawang-ramadan-fair-implementasi-kota-tertoleran/>.

Melano, Ridhoino Kristo Sebastianus. “Tjhai Chui Mie Resmikan Singkawang Christmas Day.” *Pontianak.tribunnews.com*, 23 Desember 2018. Diakses pada 14 Desember 2019.
<https://pontianak.tribunnews.com/2018/12/23/tjhai-chui-mie->

resmikan-singkawang-christmas-day?page=all.

Portal Informasi Indonesia. “Agama.” Diakses 23 Agustus 2022.
<https://indonesia.go.id/profil/agama>.

Portal Singkawang Kota. “Sejarah.” Diakses 2 September 2022.
<https://portal.singkawangkota.go.id/sejarah/>.

Rahmayana, Husna. “Profil Tjhai Chui Mie, Wanita Tionghoa Pertama Jadi Wali Kota di Indonesia.” Diakses 30 Januari 2023.
<https://kalbar.suara.com/read/2021/03/03/162130/profil-tjhai-chui-mie-wanita-tionghoa-pertama-jadi-wali-kota-di-indonesia?>.

Salim, Hanz Jimenez. “Temui Mendagri, Kapolri Bahas Daerah Rawan Pilkada 2018.” *Liputan6*, 15 Januari 2018. Diakses 31 Oktober 2019.
<https://m.liputan6.com/pilkada/read/3226677/temui-mendagri-kapolri-bahas-daerah-rawan-pilkada-2018>.

Saputra, Novi. “Bagikan Seribu Kalender Berlambang Palu Arit, Ini Tanggapan Dewan Singkawang.” *Tribun Pontianak*, 30 Juni 2016. Diakses 16 Desember 2018.
<https://pontianak.tribunnews.com/2016/06/30/bagikan-15-ribu-kalender-yang-berlambang-palu-arit-ini-tanggapan-dewan-singkawang>.

Setara Institute for Democracy and Peace. “Press Release; Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018.” Jakarta, 7 Desember 2018.

Sutan. “Pilkada Singkawang Berbau Komunis.” *Suara Pemred*, 11 Juli 2016. Diakses 30 Januari 2023.
<https://www.suarapemredkalbar.com/read/singkawang/11072016/pilkada-singkawang-berbau-komunis#>.

Syahroni. “Profil Biodata Tjhai Chui Mie Wali Kota Singkawang Lengkap Nama Suami serta Orangtua & 7 Anak.” Diakses 30 Januari 2023.
<https://pontianak.tribunnews.com/amp/2022/01/09/profil-biodata-tjhai-chui-mie-wali-kota-singkawang-lengkap-nama-suami-serta-orangtua-7-anak>.

Syahroni. “Profil Biodata Tjhai Chui Mie Wali Kota Singkawang Lengkap Nama Suami serta Orangtua & 7 Anak.” *pontianak.tribunnews.com*. Diakses pada 30 Januari 2023. <https://pontianak.tribunnews.com/amp/2022/01/09/profil-biodata-tjhai-chui-mie-wali-kota-singkawang-lengkap-nama-suami-serta-orangtua-7-anak>.

Tan, Herman. “Tjhai Chui Mie: Walikota Wanita Tionghoa Pertama di Indonesia, Ahoknya Versi Wanita.” Diakses 23 Januari 2023. <https://www.tionghoa.info/tjhai-chui-mie-walikota-singkawang-ahoknya-versi-wanita/>.

White, Sally, dan Aspinall. “Why Does a Good Woman Lose? Barriers to Women’s Political Representation in Indonesia.” *New Mandala: New Perspectives on Southeast Asia*, Research Brief December 2019. Tersedia di www.mandala.org/wp-content/uploads/2019/12/White-Aspinall-Why-Does-a-Good-Woman-Lose.pdf

Terwawancara

Tjhai Chui Mie, Wali Kota Singkawang, Singkawang, 21 November 2020.

H. Irwan, Wakil Wali Kota Singkawang, Singkawang, 27 Oktober 2022.

Juli Wahyuni, Ketua Tim Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Singkawang, Singkawang, 27 Oktober 2022.

Suganda Gani, Tim Akselerasi Pembentukan Kota Singkawang dan Anggota DPRD Kota Singkawang tahun 2007–2012, Singkawang, 26 November 2020.

Arnadi Arkan, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kota Singkawang, Singkawang, 10 November 2020.

Stephanus, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Singkawang, Singkawang, 19 November 2020.

Wiliam Simokil, Ketua Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKAPELA) Kota Singkawang, Singkawang, 16 Desember 2020.

Yulius Yoris Anes, Ketua Pemuda Adat Dayak (PAD) Kota Singkawang, Singkawang, 13 November 2021 dan 18 April 2021.

Niken Tia Tantina, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, 12 Februari 2021.

Fahmi, Kepala Bidang di Bappeda Kota Singkawang, Singkawang, 2 Februari 2020

Muhammad Abror, Komisioner KPU Kota Singkawang, 16 November 2020.

Umar Faruq, Komisioner KPU Kota Singkawang, 24 Januari 2020.

Ghazali, Sekretaris KNPI Kota Singkawang, 6 Februari 2020.

Mufarrohah, Ketua Fatayat NU Kota Singkawang, 18 November 2020.



